



DIREKTORAT JENDERAL
STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ISSN 2527-3140

TINJAUAN EKONOMI, KEUANGAN, & FISKAL

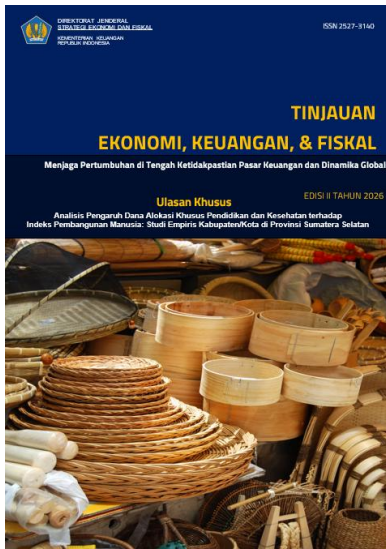
Menjaga Pertumbuhan di Tengah Ketidakpastian Pasar Keuangan dan Dinamika Global

EDISI II TAHUN 2026

Ulasan Khusus

Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan





Edisi II 2026

Foto Sampul: Ilustrasi pasar tradisional (jstudio, www.magnific.com)

Tinjauan Ekonomi, Keuangan dan Fiskal diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Kementerian Keuangan, dengan periode publikasi triwulanan dan memuat mengenai perkembangan kebijakan ekonomi, fiskal, dan keuangan terkini.

Diterbitkan oleh:

Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

Pengarah:

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

Penanggung Jawab:

Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi

Dewan Redaksi:

Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi, Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Direktur Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Sekretaris Direktorat Jenderal

Editor:

Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi, Kepala Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan-Direktorat Strategi Stabilisasi Ekonomi

Kontributor

Perkembangan Ekonomi Global: Rahadian Zulfadin, Arista Lya Kusuma, Sri Rejeki Prasasti, Widiani Putri, Fahmi Tanjung, Yanuar Falak Abiyunus

Perkembangan Ekonomi Domestik

Pertumbuhan Ekonomi: Aep Soleh, Yogi Kristanto, Wiranda Baihaqi

Inflasi: Arti Dyah Woroutami, Raditiyo Harya Pamungkas, Wignyo Parasian, Wantrijan Naibaho, Andi Yoga Trihartanto

Neraca Perdagangan dan Neraca Pembayaran: Muhammad Afdi Nizar, Dian Novi Wibowo, Kemal Abdul Rahman Al'Iksani

Moneter dan Perbankan: Rudi Handoko, Wahyu Septia Wijayanti, Dessy Kusumawardani, Restu Rinayanti

Realisasi APBN 2025: Munafsin Al Arif, Suhendi Ery Saputro, Tomy Dasmanto, Ika Kartika Sari

Ulasan Khusus

Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan: Prof. Dr. Bernadette Robiani, M.Sc.

Tim Redaksi: Suhendi Ery Saputro, Tomy Dasmanto, Celina Faramitha

Publikasi: Tomy Dasmanto, Fatima Medina Septiyanti, Bramantiyo, Mochammad Bentar Prakoso, Cessa Seftari

Alamat Redaksi:

Gedung R.M. Notohamiprodjo, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710

Situs Web: fiskal.kemenkeu.go.id

TINJAUAN

EKONOMI, KEUANGAN, & FISKAL

Edisi II 2026

KATA PENGANTAR

Perekonomian Indonesia mampu menjaga momentum pertumbuhan dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,61% (yoy) pada triwulan I 2026, yang didukung oleh konsumsi masyarakat, inflasi yang terkendali, serta keberlanjutan kinerja investasi. Di tengah capaian tersebut, berbagai risiko eksternal masih perlu diwaspadai. Ketidakpastian pasar keuangan global dalam beberapa waktu terakhir menjadi pengingat penting bahwa kewaspadaan harus terus dijaga. Selain itu, dinamika kebijakan moneter negara maju berpotensi memengaruhi aliran modal dan stabilitas pasar keuangan global, sementara risiko kenaikan harga energi dapat mendorong tekanan inflasi dan memengaruhi aktivitas ekonomi dunia. Untuk itu, Pemerintah terus mencermati perkembangan eksternal, termasuk potensi perubahan arah suku bunga global dan pergerakan harga komoditas energi. Dalam konteks tersebut, APBN terus dioptimalkan sebagai instrumen yang berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung keberlanjutan momentum pertumbuhan.

Dalam rangka mendiseminasikan informasi kepada masyarakat, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal menerbitkan Tinjauan Ekonomi, Keuangan, dan Kebijakan Fiskal (TEKF). Tinjauan yang diterbitkan triwulanan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kinerja kondisi ekonomi makro, sektor keuangan, dan kebijakan fiskal. Untuk TEKF Edisi II Tahun 2026 ini mengambil tema “Menjaga Pertumbuhan di Tengah Ketidakpastian Pasar Keuangan dan Dinamika Global” dan menghadirkan ulasan khusus dengan judul “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”.

Kami berharap publikasi ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi dalam memahami perkembangan ekonomi, sektor keuangan, serta arah kebijakan fiskal Pemerintah. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penerbitan tinjauan ini. Masukan dan saran yang konstruktif senantiasa kami harapkan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan di masa mendatang.

Selamat membaca.

Juni 2026,

Ferry Ardiyanto

Plh. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
ABREVIASI.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
PERKEMBANGAN EKONOMI TERKINI	7
Perkembangan Perekonomian Global	4
Memasuki tahun 2026, perekonomian dunia diuji oleh guncangan geopolitik	4
Risiko dan <i>Outlook</i> Ekonomi Global.....	8
Perkembangan Ekonomi Domestik	10
Perekonomian Indonesia Triwulan I 2026 Tumbuh Kuat	10
Realisasi APBN Terus Menunjukkan Tren Positif	24
ULASAN KHUSUS.....	27
Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	27

ABREVIASI

7DRR	: <i>7-day Reverse Repo Rate</i>	FOB	: <i>Free on Board</i>
Alutsista	: <i>Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia</i>	GH	: <i>Government housing</i>
AP	: <i>Administered Price</i>	HAM	: <i>Hak Asasi Manusia</i>
APBN	: <i>Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara</i>	HAP	: <i>Housing Assistance Program</i>
AS	: <i>Amerika Serikat</i>	HBKN	: <i>Hari Besar Keagamaan</i>
ASEAN	: <i>The Association of Southeast Asian Nations</i>	HET	: <i>Nasional Harga Eceran Tertinggi</i>
ASN	: <i>Aparatur Sipil Negara</i>	HUG	: <i>Housing and Urban Guarantee</i>
Bansos	: <i>Bantuan Sosial</i>	IFC	: <i>International Finance Corporation</i>
BBM	: <i>Bahan Bakar Minyak</i>	IHSG	: <i>Indeks Harga Saham Gabungan</i>
BI	: <i>Bank Indonesia</i>	IKN	: <i>Ibu Kota Nusantara</i>
BK	: <i>Bea Keluar</i>	IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
BLU	: <i>Badan Layanan Umum</i>	IT	: <i>Informasi dan Teknologi</i>
BM	: <i>Bea Masuk</i>	JKN	: <i>Jaminan Kesehatan Nasional</i>
BMN	: <i>Barang Milik Negara</i>	K/L	: <i>Kementerian dan Lembaga</i>
BPJS	: <i>Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial</i>	KI	: <i>Kredit Investasi</i>
BOS	: <i>Bantuan Operasional Sekolah</i>	KIP	: <i>Kartu Indonesia Pintar</i>
BOT	: <i>Bank of Thailand</i>	KK	: <i>Kredit Konsumsi</i>
BPS	: <i>Badan Pusat Statistik</i>	KKB	: <i>Kredit Kendaraan Bermotor</i>
bps	: <i>basis points</i>	KMK	: <i>Kredit Modal Kerja</i>
BUMN	: <i>Badan Usaha Milik Negara</i>	KND	: <i>Kekayaan Negara Dipisahkan</i>
CAR	: <i>Capital Adequacy Ratio</i>	KPM	: <i>Keluarga Penerima Manfaat</i>
Cadev	: <i>Cadangan Devisa</i>	KPU	: <i>Komisi Pemilihan Umum</i>
CDS	: <i>Credit Default Swap</i>	KPR	: <i>Kredit Pemilikan Rumah</i>
CHT	: <i>Cukai Hasil Tembakau</i>	KUR	: <i>Kredit Usaha Rakyat</i>
cif	: <i>Cost Insurance Freight</i>	LNPRT	: <i>Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga</i>
CPO	: <i>Crude Palm Oil</i>	LPG	: <i>Liquefied Petroleum Gas</i>
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>	MBG	: <i>Makan Bergizi Gratis</i>
DAK	: <i>Dana Alokasi Khusus</i>	MBR	: <i>Masyarakat Berpenghasilan Tinggi</i>
DAU	: <i>Dana Alokasi Umum</i>	Migas	: <i>Minyak dan Gas Bumi</i>
DBH	: <i>Dana Bagi Hasil</i>	MOLIT	: <i>Ministry of Land, Infrastructure, and Transport</i>
DPK	: <i>Dana Pihak Ketiga</i>	NDA	: <i>Net Domestic Asset</i>
ECB	: <i>the European Central Bank</i>	NGO	: <i>non-governmental organization</i>
FFR	: <i>Federal Funds Rate</i>		
FLPP	: <i>Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan</i>		

NEET	: <i>not in education, employment, or training</i>	PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
NFA	: Net Foreign Asset	PPN DN	: Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri
NHA	: <i>National Housing Authority</i>	PPnBM	: Pajak Penjualan atas Barang Mewah
NHUF	: National Housing and Urban Fund	PUPR	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
NIM	: Net Interest Margin	qoq	: quarter on quarter
NPI	: Neraca Pembayaran Indonesia	RoA	: Return on Assets
NPL	: <i>Non-performing loan</i>	RKI	: Rasio Kecukupan Investasi
NTB	: Neraca Transaksi Berjalan	SBN	: Surat Berharga Negara
NTMF	: Neraca Transaksi Modal Dan Finansia	SBUM	: Subsidi Bantuan Uang Muka
NTP	: Nilai Tukar Petani	SDA	: sumber daya alam
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan	SDG	: Sustainable Development Goal
PBI	: Penerima Bantuan Iuran	SDM	: Sumber Daya Manusia
PBI	: Peraturan Bank Indonesia	Sembako	: Sembilan Bahan Pokok
PDB	: Produk Domestik Bruto	SSB	: Subsidi Selisih Bunga
Pemilu	: Pemilihan Umum	SUN	: Surat Utang Negara
PIP	: Program Indonesia Pintar	Tapera	: Tabungan Perumahan Rakyat
PKH	: Program Keluarga Harapan	THR	: Tunjangan Hari Raya
PKP	: Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	TJSL	: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
PMI	: Purchasing Managers' Index	TKD	: Transfer ke Daerah
PMI	: Pekerja Migran Indonesia	TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
PMTB	: Pembentukan Modal Tetap Bruto	TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan	USD	: US Dollar
PMN	: Penyertaan Modal Negara	UST	: US Treasury
PNPB	: Pendapatan Negara Bukan Pajak	UU	: Undang-Undang
PNS	: Pegawai Negeri Sipil	VF	: <i>Volatile Food</i>
PSN	: Proyek Strategis Nasional	WEO	: World Economic Outlook
Polri	: Kepolisian Republik Indonesia	WTO	: World Trade Organization
PP	: Peraturan Pemerintah	Wisman	: Wisatawan Mancanegara
PPh	: Pajak Penghasilan	yoy	: <i>year on year</i>
PPh OP	: Pajak Penghasilan Orang Pribadi	ytd	: <i>year to date</i>

RINGKASAN EKSEKUTIF

Memasuki 2026, perekonomian global diwarnai tekanan geopolitik, terutama konflik Timur Tengah yang mendorong lonjakan harga energi, disrupsi logistik, serta ketidakpastian pasar keuangan yang memicu pergeseran ke aset *safe haven* dan arus modal keluar dari negara berkembang. Sinyal perbaikan mulai terlihat menjelang akhir Mei, dengan optimisme terhadap gencatan senjata dan koreksi harga minyak di tengah meskipun risiko ketidakpastian masih tinggi dan aktivitas perdagangan global, manufaktur, dan rantai pasok belum sepenuhnya pulih. Lonjakan komoditas dan tekanan energi turut memperlambat proses disinflasi global, mendorong bank sentral utama masih bersikap *wait-and-see* dengan kecenderungan suku bunga tinggi akan bertahan lebih lama. Di tengah kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi menunjukkan divergensi, di mana negara berkembang khususnya ASEAN tetap resilien ditopang konsumsi dan investasi, sementara negara maju menghadapi perlambatan akibat tekanan inflasi dan pengetatan moneter, meningkatkan risiko stagflasi di beberapa kawasan. Dengan latar belakang situasi tersebut, risiko geopolitik, inflasi, dan gangguan perdagangan masih menjadi tantangan utama bagi prospek ekonomi global ke depan.

Di tengah ketidakpastian global dan meningkatnya volatilitas pasar keuangan, perekonomian Indonesia pada triwulan I 2026 tetap menunjukkan kinerja yang kuat dengan pertumbuhan 5,61% (yoy). Kinerja tersebut ditopang konsumsi rumah tangga, percepatan belanja Pemerintah, investasi yang tetap tinggi, serta kinerja sektor usaha yang ekspansif. Inflasi tetap terkendali pada level 3,08% (yoy) di bulan Mei sehingga mendukung daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi. Pemerintah

terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi serta menjaga efektivitas stimulus fiskal. Di sektor keuangan, likuiditas tetap memadai, pertumbuhan kredit terjaga *double digit* di 10% (yoy) dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 11,4% (yoy) pada bulan April, dan ketahanan perbankan tetap kuat didukung permodalan serta kualitas aset yang baik. Stabilitas eksternal juga terjaga melalui surplus perdagangan yang berlanjut dalam 72 bulan dengan akumulasi surplus Januari - April 2026 USD5,64 miliar, mendukung posisi cadangan devisa pada level yang memadai sebagai bantalan menghadapi risiko global.

Hingga Mei 2026, APBN menunjukkan kinerja yang kuat dengan Pendapatan Negara tumbuh signifikan 19,1% (yoy) atau 37,6% dari APBN, ditopang oleh peningkatan penerimaan perpajakan dan PNBPN dengan terjalannya aktivitas ekonomi domestik. Di sisi Belanja Negara, realisasi dilakukan lebih awal dan merata di sepanjang tahun untuk mengoptimalkan dampak pada perekonomian. Belanja dialokasikan untuk mendukung program prioritas, menjaga daya beli masyarakat, memperkuat perlindungan sosial, serta mendorong pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Belanja Negara terealisasi 35,5% dari target APBN dan tumbuh 34,4% (yoy). Untuk mendukung kebutuhan belanja, pengelolaan pembiayaan tetap dilakukan secara hati-hati, adaptif, dan terukur guna menjaga keberlanjutan fiskal di tengah ketidakpastian global. Kondisi pasar Surat Berharga Negara tetap kondusif dengan minat investor yang terjaga dan yield yang relatif stabil, mencerminkan kepercayaan terhadap kredibilitas pengelolaan fiskal Pemerintah.

TEKF edisi ini mengangkat tema "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus Pendidikan dan

Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”. Ulasan ini membahas peran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang Pendidikan serta Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2021–2023. Kajian ini berangkat dari kondisi IPM Sumatera Selatan yang terus meningkat, dari 70,01 pada tahun 2020 menjadi 71,62 pada tahun 2023, meskipun capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional. Di sisi lain, dana untuk bidang pendidikan cenderung menurun, sementara dana untuk bidang kesehatan dan KB masih bergerak naik turun.

Hasil kajian menunjukkan bahwa DAK bidang kesehatan serta DAK bidang pendidikan berpengaruh positif terhadap peningkatan IPM. Artinya, dukungan anggaran untuk memperbaiki layanan pendidikan dan kesehatan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik melalui akses sekolah yang lebih baik, fasilitas kesehatan yang lebih memadai, maupun layanan dasar yang lebih merata. Namun, peningkatan IPM tidak hanya ditentukan oleh dana pendidikan dan kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, investasi, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Dengan demikian, DAK Pendidikan serta DAK Kesehatan dan KB merupakan instrumen penting untuk mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat, tetapi pelaksanaannya perlu lebih tepat sasaran, merata, dan didukung oleh kebijakan pembangunan daerah lainnya.

BAGIAN I

PERKEMBANGAN EKONOMI TERKINI



Foto: Aktivitas masyarakat di pasar tradisional
Sumber: Pexels. Foto stok gratis tentang orang, masyarakat, dan aktivitas pasar di Jawa Tengah, Indonesia. Diakses pada 10 Juni 2026 dari laman Pexels. [pexels.com]

Perkembangan Perekonomian Global

Memasuki tahun 2026, perekonomian dunia diuji oleh guncangan geopolitik

Optimisme yang terbangun dengan pertumbuhan kuat di 2025 tergerus oleh konflik berkepanjangan di Timur Tengah pada pertengahan triwulan I tahun ini. Penutupan selat Hormuz memicu lonjakan harga energi dan biaya logistik global. Ketidakpastian yang disebabkan oleh konflik ini juga menyebabkan tekanan di pasar keuangan. Investor cenderung menghindari aset berisiko dan beralih ke instrumen *safe haven*. Nilai tukar dan aset investasi negara berkembang mengalami tekanan akibat arus modal keluar (*capital outflow*) investor global.

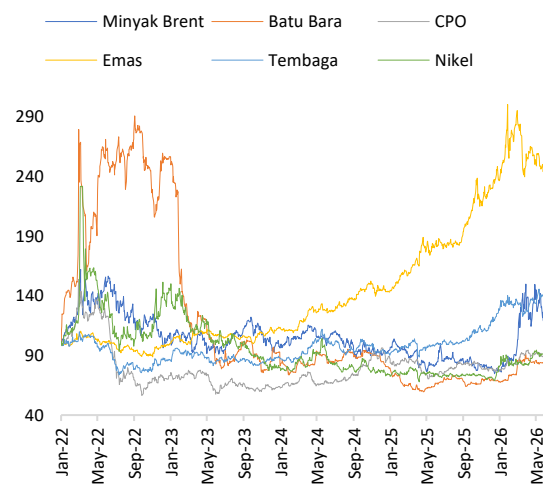
Perkembangan positif mulai muncul pada akhir Mei ketika harga minyak terkoreksi seiring optimisme atas prospek gencatan senjata AS-Iran. Meskipun belum tercapai kesepakatan permanen, kemungkinan pembukaan kembali Selat Hormuz semakin besar. Namun demikian, aktivitas pengiriman di Selat Hormuz masih lesu, biaya asuransi kapal *tanker* tetap tinggi, dan sejumlah operator pelayaran masih menghindari kawasan tersebut. Ketidakpastian geopolitik belum sepenuhnya mereda dan risiko terhadap stabilitas pasar keuangan global masih tetap ada.

Ketegangan di Timur Tengah melambungkan harga komoditas energi, pangan, dan logam. Memasuki Mei, harga minyak Brent bertahan di kisaran USD100 per barel di tengah dinamika negosiasi damai. Harga batu bara sebagai sumber energi alternatif mengikuti pergerakan harga minyak. Di sektor pangan, harga CPO terus menguat didorong permintaan global dan implementasi kebijakan B40 di Indonesia yang memperketat suplai global, serta ekspektasi pasar terhadap peluang transisi ke B50. Harga emas sempat mengalami kenaikan signifikan sebagai aset *safe haven* di tengah meningkatnya ketidakpastian dan risiko pasar keuangan sebelum terkoreksi pada akhir Mei seiring penguatan dolar AS dan kenaikan imbal hasil obligasi. Kenaikan harga tembaga ditopang permintaan struktural dari infrastruktur kecerdasan buatan dan elektrifikasi. Sementara itu, harga nikel juga

mengalami penguatan yang didorong pengetatan pasokan dari Indonesia.

GRAFIK 1

Perkembangan Harga Komoditas (indeks 1 Januari 2022 = 100)



Sumber: Bloomberg, diolah

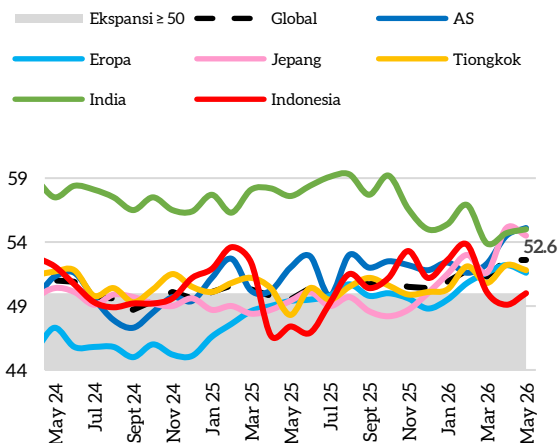
Perdagangan global pada triwulan kedua tahun 2026 mulai memasuki fase normalisasi bertahap, pemulihan belum terjadi secara menyeluruh. Sepanjang periode April hingga Juni, kepanikan pasar akibat konflik Timur Tengah perlahan mereda seiring dengan sentimen bisnis yang berangsur stabil. Namun, aktivitas perdagangan belum sepenuhnya kembali ke kapasitas optimal karena rantai pasok dunia masih berada dalam masa adaptasi struktural. Para pelaku usaha di triwulan kedua ini masih harus terus menavigasi risiko dari konflik yang terjadi, seperti penyesuaian rute logistik pelayaran maritim dan fluktuasi harga energi. Situasi ini menyebabkan pemulihan arus perdagangan internasional masih terbatas karena diliputi kehati-hatian yang tinggi.

Kinerja manufaktur global pada triwulan kedua 2026 mulai menunjukkan sinyal pemulihan yang ekspansif, sejalan dengan normalisasi permintaan yang mulai terbangun. Setelah sempat tertekan cukup tajam pada puncak krisis geopolitik bulan Maret lalu, PMI Manufaktur Global perlahan merangkak naik didorong volume pesanan baru

(new orders) dan peningkatan aktivitas produksi pabrik. Meskipun demikian, laju akselerasi sektor manufaktur belum meningkat secara optimal karena para pelaku usaha masih dihadapkan pada tantangan disrupti rantai pasok, seperti panjangnya waktu tunggu pengiriman barang (*supplier delivery times*) serta tingginya beban biaya input bahan baku di sepanjang triwulan ini.

GRAFIK 2

PMI Manufaktur Global dan Beberapa Negara G20

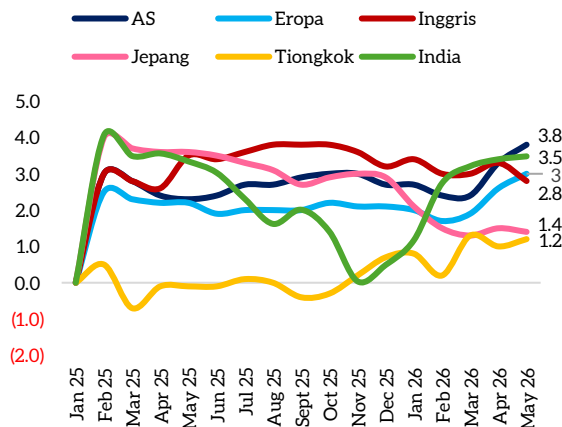


Sumber: Bloomberg, diolah

Memasuki pertengahan tahun 2026, risiko inflasi global meningkat akibat lonjakan harga energi dampak ketegangan di Timur Tengah. IMF memproyeksikan inflasi *headline* global meningkat ke level 4,4% pada 2026, lebih tinggi dari estimasi sebelumnya. Di AS, inflasi meningkat ke level 3,8% pada April 2026, dengan tekanan dari tarif perdagangan baru dan pasar tenaga kerja yang tetap ketat, sehingga memperlemah ekspektasi penurunan suku bunga the Federal Reserve. Kawasan Eropa mencatatkan kenaikan inflasi ke 3,2% pada Mei 2026, tertinggi sejak 2023. Inggris masih menghadapi inflasi di kisaran 2,8% disertai ketidakpastian politik domestik. Di Asia, Tiongkok bergulat dengan inflasi rendah sekitar 1,2%, Jepang melandai ke 1,4%, sedangkan India mencatat inflasi 3,5%.

GRAFIK 3

Inflasi di Berbagai Negara

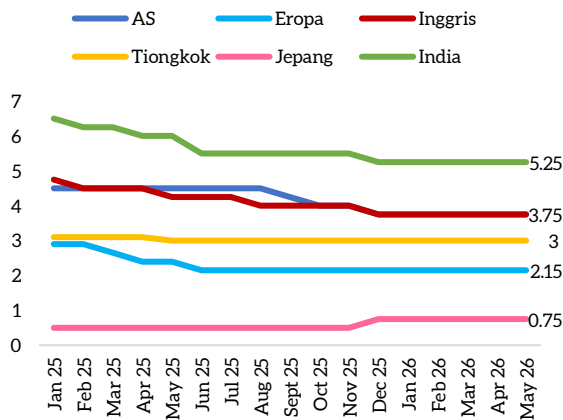


Sumber: Bloomberg, diolah

Arah kebijakan moneter global pada pertengahan 2026 didominasi oleh sikap *wait-and-see* bank-bank sentral utama dunia. The Fed mempertahankan suku bunga pada kisaran 3,50–3,75%, dengan inflasi indeks harga konsumen April 2026 tercatat 3,8% (yoy), tertinggi sejak pertengahan 2023. The Fed masih memproyeksikan satu kali pemangkasan di tahun ini. European Central Bank (ECB) juga mempertahankan suku bunga di level 2,15% pada April, seiring meningkatnya risiko inflasi akibat perang di Timur Tengah. Inflasi kawasan Eropa meningkat ke 3,2% (yoy) pada Mei 2026, jauh di atas target ECB. ECB diperkirakan akan menaikkan suku bunga dua kali sepanjang 2026, dengan kenaikan 25 basis poin pada Juni dan September, seiring tekanan inflasi yang dipicu perang. Bank of England (BoE) mempertahankan suku bunga di 3,75% pada April 2026. Bank of Japan (BoJ) mempertahankan suku bunga jangka pendek di 0,75% pada Maret 2026 yang merupakan level tertinggi sejak September 1995. Upaya BoJ dilakukan di tengah pemulihan ekonomi yang moderat namun tertahan oleh ketidakpastian geopolitik. Tiongkok mempertahankan suku bunga pinjaman acuan 1 tahun di 3,0% dan pinjaman 5 tahun di 3,5%, keduanya merupakan level terendah sepanjang sejarah dan telah terjadi selama 12 bulan berturut-turut hingga Mei 2026.

GRAFIK 4

Suku Bunga di Berbagai Negara

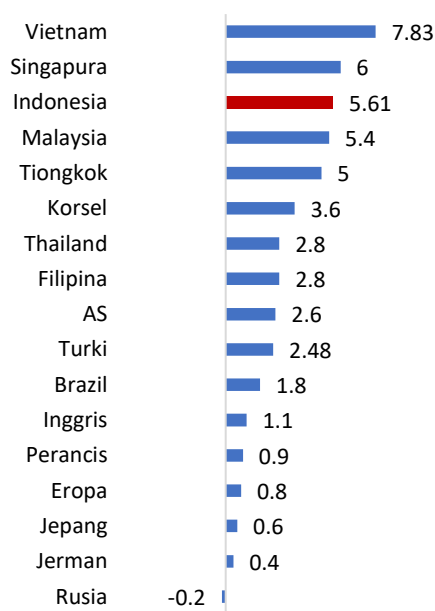


Sumber: Bloomberg, diolah

Pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama 2026 menunjukkan divergensi antara resiliensi negara berkembang dan stagnasi negara maju. Kawasan ASEAN memiliki resiliensi yang kuat di tengah gejala rantai pasok global. Vietnam tumbuh 7,83% (yoy), Singapura tumbuh 6% dan Indonesia tumbuh 5,61%. Di sisi lain, negara-negara di Eropa dan negara-negara yang terisolasi konflik justru menunjukkan lesunya pertumbuhan ekonomi akibat inflasi energi dan pengetatan moneter yang menggerus kinerja terutama sektor manufaktur dan konsumsi.

GRAFIK 5

Pertumbuhan PDB Riil Triwulan I 2026



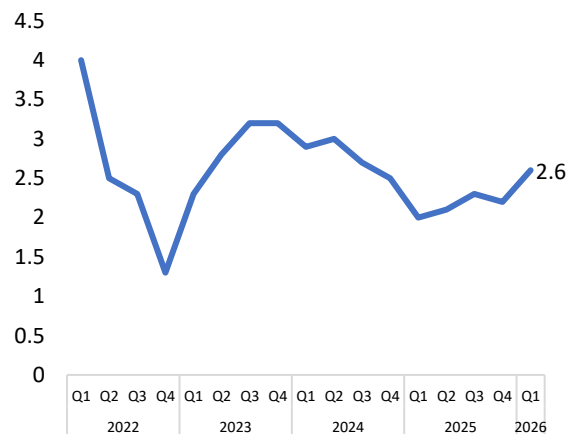
Sumber: Bloomberg, diolah

Perekonomian Amerika Serikat (AS) menghadapi perlambatan momentum pertumbuhan domestik

yang dibayangi tekanan inflasi akibat *supply shock* dari komoditas energi. Perlambatan ini secara nyata tercermin pada realisasi pertumbuhan PDB triwulan pertama yang tertahan di level 2,6% (yoy). PDB AS, terutama tertekan oleh melebarnya defisit perdagangan seiring lonjakan impor dan moderasi konsumsi. Secara *full-year*, PDB diekspektasikan tumbuh moderat di kisaran 2,0 - 2,2%. Inflasi meningkat ke angka 3,8% pada April 2026, meskipun inflasi inti masih menunjukkan stabilitas. Kombinasi hilangnya momentum pertumbuhan dan persistennya tekanan harga ini pada akhirnya mempersempit ruang gerak The Fed, sehingga mendorong langkah the Fed mempertahankan *Fed Funds Rate* di kisaran 3,50 - 3,75% menjadi lebih lama dari ekspektasi awal (*higher for longer*). Kondisi ini turut menunda potensi pemangkasan suku bunga hingga akhir tahun demi memitigasi risiko inflasi tanpa memicu perlambatan ekonomi yang lebih dalam.

GRAFIK 6

Pertumbuhan Ekonomi AS (% yoy)



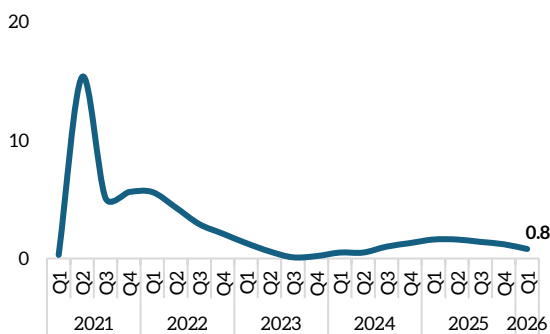
Sumber: Bloomberg, diolah

Kawasan Eropa mengalami moderasi pertumbuhan di level 0,1% pada triwulan pertama 2026. Pertumbuhan ini merupakan level paling lemah sejak triwulan kedua 2025. Divergensi level pertumbuhan antarnegara di kawasan masih terjadi dan signifikan. Spanyol kembali menjadi motor utama dengan pertumbuhan 0,6% pada triwulan pertama 2026, ditopang konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal bruto. Inggris tumbuh 0,6%, Jerman tumbuh 0,3%, dan Italia tumbuh 0,3%. Di sisi lain, ekonomi Perancis justru berkontraksi pada triwulan pertama 2026 dengan pertumbuhan -0,1%, menjadi kontraksi pertama sejak triwulan

kedua 2020. Di sisi harga, kondisi berbalik drastis dibandingkan awal tahun. Setelah mencatat inflasi rendah 1,7% pada Januari 2026, laju kenaikan harga kawasan Eropa terus meningkat selama empat bulan berturut-turut hingga mencapai 3,2% pada Mei 2026, didorong oleh lonjakan harga energi. Lonjakan inflasi ini mengubah kalkulasi ECB terhadap kebijakan suku bunga. ECB mempertahankan suku bunga utama di 2,15% pada rapat April 2026, namun pasar kini memperhitungkan kenaikan suku bunga 25 basis poin akan diputuskan pada rapat bulan Juni. Secara keseluruhan, kawasan Eropa memasuki pertengahan 2026 dalam kondisi yang lebih rawan dibandingkan proyeksi awal tahun. Perlambatan pertumbuhan dan peningkatan inflasi berpotensi menciptakan tekanan stagflasi, terutama bagi Perancis dan Italia yang ruang fiskalnya cukup sempit.

GRAFIK 7

Pertumbuhan Ekonomi Eropa (%)



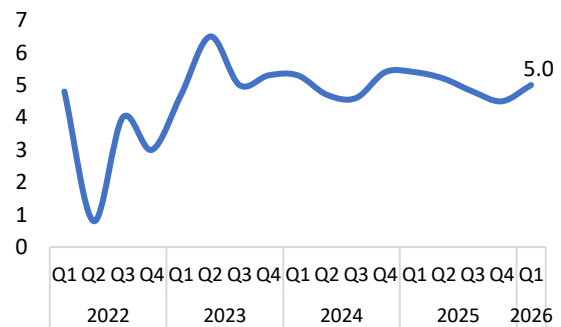
Sumber: Bloomberg, diolah

Perekonomian Tiongkok tumbuh 5,0% (yoy) pada triwulan pertama 2026, membalikkan tren penurunan di paruh kedua 2025. Namun, apabila krisis Timur Tengah masih berkepanjangan, momentum pertumbuhan Tiongkok berpotensi melemah di sisa tahun 2026. Surplus perdagangan Tiongkok menyempit pada April 2026 disebabkan pertumbuhan impor yang jauh lebih tinggi dari ekspor. Pada bulan Mei, Indeks PMI manufaktur mengalami penurunan ke level 50,0 sedangkan PMI nonmanufaktur kembali ke zona ekspansi (50,1), didorong penguatan aktivitas di sektor jasa dan konstruksi. Di sisi lain, tekanan deflasi struktural mulai mereda, meski kepercayaan konsumen masih tertahan oleh berlanjutnya krisis properti dan tekanan pendapatan rumah tangga. Penjualan ritel April tumbuh 0,2%, terendah sejak 2022. Inflasi Tiongkok naik menjadi 1,2% (yoy) pada

April 2026, didorong kenaikan harga energi. Inflasi harga produsen melonjak menjadi 2,8% pada April, didorong transmisi lonjakan harga energi. Merespons hal tersebut, bank sentral Tiongkok menerapkan kebijakan moneter longgar. Di sisi fiskal, Pemerintah melanjutkan percepatan penerbitan obligasi daerah untuk proyek infrastruktur serta program subsidi konsumsi.

GRAFIK 8

Pertumbuhan PDB Tiongkok (yoy)



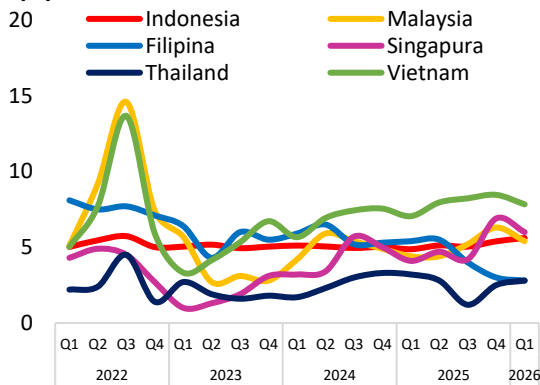
Sumber: Bloomberg, diolah

Pada triwulan pertama 2026, perekonomian kawasan ASEAN menunjukkan pemulihan di tengah divergensi pertumbuhan dan tekanan harga akibat supply shock energi. Secara performa, Vietnam memimpin pertumbuhan ekonomi berkat masuknya investasi rantai pasok. Indonesia tumbuh solid ditopang konsumsi domestik serta ekspor komoditas. Sementara, Singapura dan Malaysia mulai pulih mengikuti siklus produksi elektronik global. Sebaliknya, Filipina dan Thailand justru menunjukkan perlambatan. Status keduanya yang merupakan *net importer* energi membuat perekonomian rentan terhadap lonjakan harga minyak yang langsung menekan daya beli masyarakat. Tekanan inflasi lintas batas ini pada akhirnya membatasi ruang gerak bank-bank sentral di ASEAN, memaksa mereka untuk mempertahankan postur moneter yang defensif guna mencegah depresiasi mata uang lokal terhadap dolar AS, sekaligus menunda pelonggaran yang sebelumnya diharapkan menjadi stimulus untuk pertumbuhan lebih lanjut.

GRAFIK 9

Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara ASEAN

(% yoy)



Sumber: Bloomberg, diolah

Risiko dan *Outlook* Ekonomi Global

Memasuki pertengahan 2026, ekonomi global mengalami tekanan akibat guncangan geopolitik. Konflik di Timur Tengah menginterupsi momentum pemulihan dan memaksa lembaga internasional mengalibrasi ulang proyeksi makroekonomi secara menyeluruh. IMF dalam *World Economic Outlook* (April 2026) merevisi ke bawah proyeksi ekonomi global ke 3,1% di 2026, turun 0,2 poin persentase dari proyeksi Januari. OECD bahkan lebih pesimistis, dengan memperkirakan pertumbuhan global hanya 2,8% pada 2026 sebelum pulih ke 3,1% pada 2027 dalam skenario gangguan bersifat temporer. Jika konflik berlanjut hingga 2027, pertumbuhan dapat turun lebih tajam menjadi 2,1% pada 2026 dan 1,8% pada 2027. IMF juga menggambarkan skenario serupa, dengan pertumbuhan berpotensi merosot ke sekitar 2% apabila kerusakan infrastruktur energi meluas dan ekspektasi inflasi menjadi tidak terkendali. Dampak terbesar diperkirakan dialami negara berkembang pengimpor komoditas. Negara tersebut akan menghadapi tekanan lebih berat dari lonjakan harga energi dan pangan, depresiasi nilai tukar, serta pembalikan arus modal.

Tren penurunan inflasi yang berjalan selama dua tahun terakhir terhenti akibat lonjakan harga energi dan komoditas dari krisis Timur Tengah. IMF memproyeksikan inflasi global naik menjadi 4,4% pada 2026, direvisi ke atas sebesar 0,6 poin persentase dari proyeksi sebelumnya. OECD memperkirakan inflasi G20 akan naik dari 3,4% pada 2025 menjadi 4,0% pada 2026 sebelum mereda

ke 3,1% pada 2027 dalam skenario gangguan bersifat terbatas. Baik IMF maupun OECD menekankan bahwa tekanan inflasi berasal dari sisi penawaran sehingga bank sentral menghadapi dilema antara membiarkan inflasi tanpa menaikkan suku bunga dengan risiko inflasi menjadi permanen, atau menaikkan suku bunga agresif dengan risiko memperparah pelemahan ekonomi.

Perdagangan dunia diperkirakan melemah akibat tekanan rantai pasok global. Volume perdagangan dunia diproyeksikan melambat tajam dari pertumbuhan 5,1% (IMF) atau 5,0% (OECD) pada 2025 menjadi sekitar 2,8% (IMF) dan 3,1% (OECD) pada 2026. IMF memproyeksikan perdagangan baru akan pulih ke 3,8% pada 2027, sementara OECD memperkirakan perdagangan terus melambat ke 2,9% pada 2027. Tekanan terbesar berasal dari terputusnya jalur pengiriman melalui Selat Hormuz, mendorong kenaikan tarif pengiriman laut dan udara. Sebelum konflik, pertumbuhan perdagangan yang kuat didorong oleh arus perdagangan terkait kecerdasan buatan (AI) dan semikonduktor, serta penurunan ketidakpastian kebijakan perdagangan AS. Tarif efektif AS kini lebih rendah dari puncaknya di 2025, menjadi salah satu faktor penyeimbang. Namun, kerangka perjanjian tarif yang bersifat sementara dan bergantung pada persetujuan Kongres AS menjadi sumber ketidakpastian tersendiri.

Dari sisi regional, dampak konflik terhadap prospek pertumbuhan antarkawasan sangat bervariasi. Negara berkembang di Asia tetap tumbuh namun melambat ke 4,9% (IMF), dengan ekonomi Asia Tenggara paling terpapar mengingat ketergantungan energi yang tinggi dari kawasan Teluk. Tiongkok relatif terlindungi berkat bauran energi terbarukan yang lebih besar dan stimulus domestik, sementara India diuntungkan oleh penurunan tarif AS. Eropa tertekan oleh kenaikan harga energi yang menambah beban pasca-invasi Rusia; kawasan Eropa hanya tumbuh 1,1% (IMF) atau 0,8% (OECD) pada 2026. AS bertahan lebih baik berkat status net eksportir energi, dengan pertumbuhan diproyeksikan 2,0–2,3% pada 2026.

Perekonomian dunia dibayangi berbagai risiko penurunan (*downside risk*). Risiko utama adalah eskalasi konflik Timur Tengah menjadi krisis energi skala besar. Dalam skenario terburuk IMF,

pertumbuhan global dapat jatuh ke 2% dengan inflasi mendekati 6%. Sekalipun konflik mereda, pemulihan infrastruktur energi akan membutuhkan waktu berbulan-bulan. Ekspektasi inflasi berisiko meleset dari target, memaksa pengetatan moneter yang memperparah pelemahan ekonomi. Dari sisi keuangan, koreksi valuasi aset AI dan tekanan *refinancing* utang

korporasi berpotensi memperketat kondisi keuangan. Gangguan pasokan pupuk dari kawasan Teluk juga mengancam ketahanan pangan global pada akhir 2026 hingga 2027, sementara ruang fiskal negara berkembang yang sudah tipis membatasi kemampuan dalam meredam tekanan.

Perkembangan Ekonomi Domestik

Perekonomian Indonesia

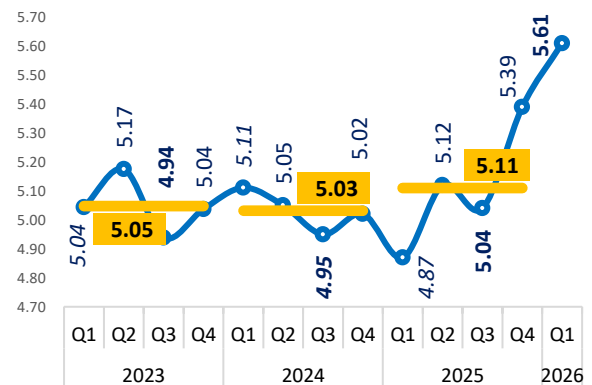
Triwulan I 2026 Tumbuh Kuat

Ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh tinggi 5,61% (yoy). Kuatnya permintaan domestik, terutama dengan dorongan percepatan belanja Pemerintah melalui berbagai program prioritas nasional, menjadi *prime mover* dan memberikan efek pengganda terhadap konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (investasi). Secara sektoral, industri pengolahan, perdagangan, penyediaan akomodasi makan minum mencatat performa impresif, didorong momentum Ramadan Idul Fitri, perluasan kebijakan ketahanan pangan, serta program pemenuhan gizi masyarakat. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi terdistribusi di seluruh pulau dengan pertumbuhan tertinggi di wilayah Bali-Nusa Tenggara dan Jawa masih menjadi kontributor utama.

Pertumbuhan tinggi ekonomi domestik terjadi di tengah perlambatan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik yang memicu fluktuasi harga komoditas andalan ekspor Indonesia. Proyeksi melandainya pertumbuhan dunia juga dialami negara mitra dagang utama Indonesia, yaitu Tiongkok yang hanya tumbuh 5,0% (yoy) pada triwulan I 2026 dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu dengan pertumbuhan hingga 5,4%. Dari pasar komoditas internasional, harga minyak kelapa sawit (CPO) berkontraksi 1,81%, sedangkan komoditas energi seperti batu bara dan gas alam melonjak masing-masing 11,31% dan 14,42%; menjadi penopang kinerja neraca perdagangan nasional dan penerimaan negara. Meskipun menghadapi dinamika tersebut, struktur PDB Indonesia yang mencapai Rp6.187,2 triliun (ADHB) atau setara dengan Rp3.447,7 triliun (ADHK) membuktikan bahwa mesin ekonomi domestik bekerja optimal. Dorongan melalui penguatan tata kelola kebijakan fiskal berkontribusi optimal, dengan belanja Pemerintah yang ekspansif sejak awal tahun. Secara musiman, kinerja ekonomi triwulan I juga didorong oleh pergeseran siklus HBKN Ramadan dan Idulfitri yang pada tahun ini terjadi di triwulan pertama.

GRAFIK 10

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



Sumber: BPS, diolah

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, sebagai kontributor utama perekonomian (54,36% PDB) tumbuh signifikan sebesar 5,52% (yoy) dengan andil 2,94%. Akselerasi konsumsi tersebut secara linier dipicu peningkatan velositas uang selama perayaan HBKN Ramadan dan Idulfitri, diperkuat penyaluran Tunjangan Hari Raya sektor swasta serta realisasi penuh Gaji Ke-14 bagi ASN, TNI, Polri, dan pensiunan pada triwulan I. Indikator penguat tercermin pada Indeks Penjualan Eceran Riil yang tumbuh 4,74% (yoy), dengan performa tertinggi dicatatkan oleh kelompok Restoran dan Hotel (7,38%) serta Transportasi dan Komunikasi (6,91%). Mobilitas masyarakat yang ekspansif ini dikatalisasi oleh intervensi kebijakan fiskal melalui skema subsidi dan stimulus diskon tarif transportasi massal (moda darat, laut, dan udara).

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) tumbuh sangat tinggi mencapai 21,81% (yoy). Pemerintah mengadopsi strategi ekspansif fiskal proaktif (*front loading*) untuk mempercepat stimulus makroekonomi. Mulai tahun 2026, Pemerintah mempercepat pelaksanaan anggaran sehingga realisasi anggaran akan lebih merata di sepanjang tahun untuk mengoptimalkan efektivitas dukungan fiskal terhadap perekonomian. Akselerasi penyerapan anggaran Pemerintah tercermin pada realisasi Belanja Pegawai yang tumbuh 14,1% (Rp161,7 triliun) dan Belanja Barang yang tumbuh sangat tinggi sebesar 113,7% (Rp111,2 triliun). Sementara itu, ekspansi infrastruktur dasar tetap terjaga melalui realisasi

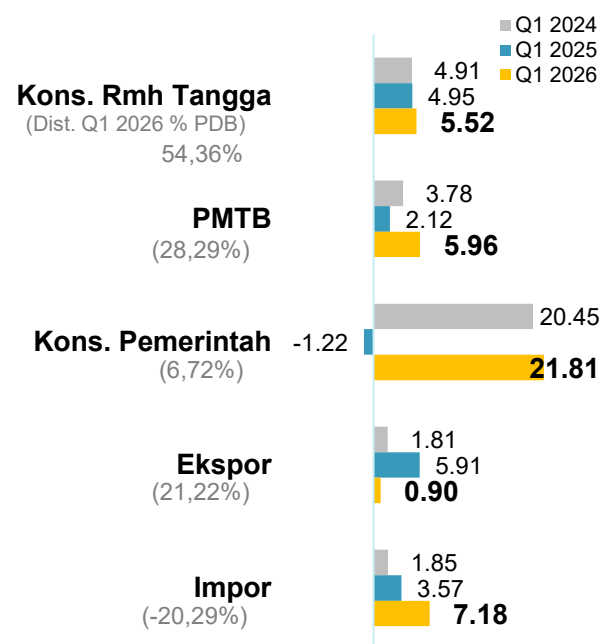
Belanja Modal yang tumbuh 36,7% mencapai Rp35,4 triliun.

Kinerja investasi turut mempertahankan tren pertumbuhan yang kuat di 5,96% (yoy). Sektor bangunan tumbuh stabil 5,29% seiring akselerasi fisik PSN, sementara investasi mesin dan perlengkapan tumbuh ekspansif 10,78%, terkonfirmasi oleh tingginya volume impor barang modal korporasi. Subkomponen kendaraan niaga mencatat kenaikan 12,39% untuk memperkuat kapasitas logistik domestik. Penguatan PMTB ini selaras dengan langkah institusi Danantara yang melakukan *groundbreaking* 13 proyek hilirisasi strategis yang sekaligus meningkatkan *confidence* sektor swasta untuk melakukan ekspansi. Sementara itu, sektor eksternal menghadapi tantangan struktural. Ekspor barang dan jasa secara riil tumbuh terbatas di 0,90% (yoy) akibat kontraksi volume komoditas nonmigas, namun ekspor jasa tumbuh akseleratif sebesar 9,11% ditopang oleh kenaikan arus kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 8,62% (yoy). Impor tumbuh tinggi di level 7,18% (yoy), didominasi oleh impor bahan baku industri untuk menopang rantai pasok manufaktur domestik.

Ekspor barang dan jasa pada triwulan I 2026 tumbuh 0,90% (yoy). Pertumbuhan positif ekspor ditopang oleh meningkatnya ekspor barang yang tumbuh 0,17%, terutama untuk komoditas lemak dan minyak hewan/nabati, besi dan baja, nikel dan barang daripadanya, serta mesin dan peralatan listrik. Dari sisi jasa, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada triwulan I 2026 yang tumbuh 8,62% (yoy) turut menopang kinerja ekspor jasa dengan pertumbuhan 9,11%. Pada periode yang sama, impor barang dan jasa riil tumbuh 7,18%; terutama impor untuk bahan baku dan barang modal. Impor barang riil tumbuh 32,72% untuk mendukung kebutuhan produksi dalam negeri, sementara impor jasa riil berkontraksi 16,88%.

GRAFIK 11

Pertumbuhan PDB sisi pengeluaran (% ,yoy)



Sumber: BPS, diolah

Dari sisi lapangan usaha, performa ekonomi Triwulan I 2026 menunjukkan penguatan fundamental yang merata di hampir semua sektor utama. Lima sektor dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi nasional yaitu Industri Pengolahan, Perdagangan, Pertanian, Konstruksi, dan Pertambangan, mampu mempertahankan tren pertumbuhan yang sangat sehat, kecuali sektor pertambangan yang mengalami kontraksi.

Kebijakan hilirisasi dan kuatnya permintaan domestik menjadi penopang kinerja sektor Industri Pengolahan dengan pertumbuhan 5,04% (yoy). Implementasi hilirisasi menjadi sumber pertumbuhan, tercermin dari akselerasi industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik yang tumbuh tinggi 10,35% (yoy), sejalan dengan meningkatnya permintaan luar negeri terhadap komponen elektronik dan baterai. Peningkatan aktivitas produksi juga terjadi pada industri makanan dan minuman yang tumbuh 7,04% (yoy), didorong meningkatnya permintaan selama periode Ramadan dan Idulfitri, peningkatan produksi beras seiring panen raya, serta tingginya permintaan ekspor CPO dan CPKO. Industri kimia, farmasi, dan obat tradisional tumbuh 7,41% (yoy), sejalan dengan peningkatan produksi untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun pasar ekspor.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencatatkan pertumbuhan positif 4,97% (yoy), didukung peningkatan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan domestik. Pertumbuhan tersebut terutama bersumber dari subsektor tanaman pangan yang tumbuh 7,58% (yoy) dengan adanya peningkatan luas panen dan produksi padi serta jagung. Momentum panen raya padi yang terkonsentrasi pada Maret 2026 menjadi faktor utama meningkatnya produksi tanaman pangan, dengan luas panen dan produksi mencapai level tertinggi dalam satu tahun. Sementara itu, subsektor peternakan tumbuh kuat sebesar 11,84% (yoy), didorong oleh peningkatan produksi telur dan daging ayam ras untuk memenuhi kenaikan permintaan selama periode Ramadan dan Idulfitri, serta mendukung suplai untuk program MBG. Bertambahnya penerima manfaat program MBG turut menjadi pengungkit aktivitas produksi subsektor peternakan.

Sektor Perdagangan tumbuh impresif 6,26% (yoy), didukung peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat serta penguatan pasokan barang domestik dan impor. Kinerja tersebut tercermin dari Indeks Penjualan Eceran Riil yang tumbuh 5,19% (yoy) dan impor barang konsumsi yang meningkat 6,12% (yoy). Pertumbuhan sektor perdagangan juga ditopang oleh meningkatnya produksi domestik, khususnya dari sektor pertanian dan industri pengolahan, serta peningkatan impor barang konsumsi, barang modal, dan bahan baku penolong untuk menjaga ketersediaan pasokan. Dari sisi permintaan, peningkatan aktivitas belanja masyarakat selama periode Ramadan dan HBKN menjadi salah satu faktor pendorong utama kinerja sektor perdagangan. Selain itu, perkembangan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan transaksi perdagangan sejalan dengan perubahan pola konsumsi masyarakat. Berdasarkan subsektor, Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor tumbuh kuat 7,34% (yoy), sementara subsektor Perdagangan Mobil, Sepeda Motor, dan Reparasinya tumbuh 1,03% (yoy).

Sektor Konstruksi mencatat pertumbuhan positif 5,49% (yoy) dengan meningkatnya aktivitas pembangunan infrastruktur serta penguatan

realisasi belanja modal Pemerintah dan investasi swasta. Kinerja sektor ini terutama ditopang percepatan pembangunan infrastruktur dalam kerangka PSN, termasuk pembangunan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta pembangunan sarana dan prasarana pendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KMP). Selain itu, peningkatan realisasi belanja modal Pemerintah untuk pembangunan bangunan, jalan, dan irigasi turut mendorong aktivitas konstruksi, tercermin dari meningkatnya kebutuhan atas barang pendukung aktivitas tersebut.

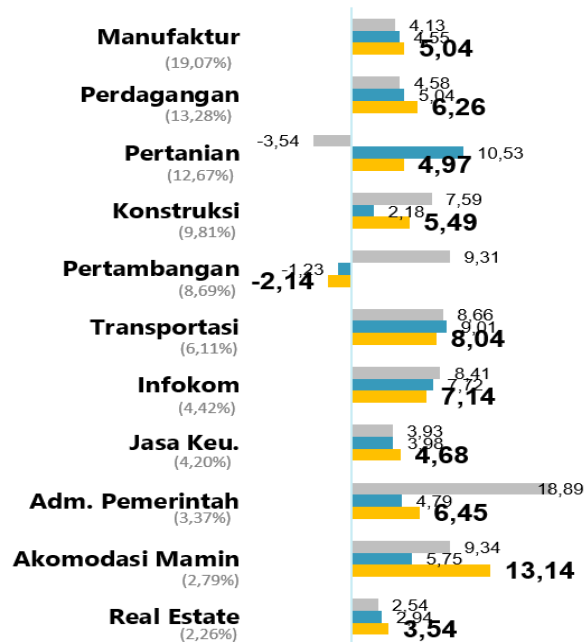
Peningkatan mobilitas masyarakat mendorong penguatan kinerja sektor terkait pariwisata pada triwulan I 2026. Sektor Transportasi dan Pergudangan tumbuh 8,04% (yoy), sementara Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh lebih tinggi hingga 13,14% (yoy). Perkembangan tersebut didukung meningkatnya aktivitas perjalanan masyarakat, baik domestik maupun mancanegara. Pertumbuhan perjalanan wisatawan nusantara mencapai 13,14% (yoy) dan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 8,62% (yoy). Momentum libur nasional dan periode mudik Idulfitri turut memperkuat mobilitas masyarakat, berdampak pada peningkatan permintaan jasa transportasi dan tingkat hunian akomodasi. Kinerja Sektor Transportasi dan Pergudangan tercermin pada peningkatan jumlah penumpang di berbagai moda transportasi serta meningkatnya aktivitas pengiriman barang domestik dan internasional. Pertumbuhan jumlah penumpang tercatat pada angkutan darat sebesar 20,20% (yoy); angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sebesar 23,83% (yoy); angkutan udara sebesar 5,27% (yoy); serta angkutan laut sebesar 4,44% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum disumbang oleh aktivitas pariwisata serta jasa boga dengan perluasan penerima manfaat program MBG, yang turut mendorong peningkatan permintaan layanan penyediaan makanan.

Secara spasial, tingginya aktivitas ekonomi di tingkat nasional diikuti aktivitas di seluruh kawasan. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencatat pertumbuhan ekonomi yang solid 7,93% (yoy), didukung peningkatan kinerja sektor pertambangan dan industri manufaktur.

Sementara itu, Pulau Jawa sebagai kontributor utama perekonomian nasional tetap tumbuh kuat sebesar 5,79% (yoy), sejalan dengan peningkatan aktivitas industri pengolahan, perdagangan, serta jasa informasi dan komunikasi. Pengembangan industri hilirisasi sumber daya alam (SDA) menjadi faktor utama pendorong pertumbuhan wilayah Sulawesi dan Maluku-Papua yang masing-masing tumbuh 6,95% (yoy) dan 4,46% (yoy). Pertumbuhan tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi, yang didukung terutama oleh penguatan industri pengolahan. Di sisi lain, perekonomian Kalimantan tumbuh sebesar 4,08% (yoy), ditopang meningkatnya aktivitas sektor perdagangan, manufaktur, dan konstruksi.

GRAFIK 12

Pertumbuhan PDB sisi produksi (% , yoy)



Sumber: BPS, diolah

Sektor-sektor utama lainnya menunjukkan pertumbuhan positif dan memperkuat kinerja ekonomi secara keseluruhan. Sektor Konstruksi tumbuh 4,21%, didorong percepatan pembangunan infrastruktur terutama terkait PSN. Pembangunan ini tidak hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga memperkuat fondasi untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh 4,93% dengan kenaikan permintaan domestik. Subsektor perkebunan menjadi kontributor utama dengan pertumbuhan 4,56%, terutama dengan peningkatan produksi kelapa sawit dan kopi. Subsektor peternakan tumbuh

6,51%; antara lain untuk memenuhi kebutuhan ayam dan telur program MBG. Sebaliknya, sektor Pertambangan menjadi satu-satunya sektor yang berkontraksi (-1,98%) akibat menurunnya permintaan ekspor batu bara dan tembaga, serta penurunan produksi gas alam seiring penuaan sumur gas.

Kinerja sektor jasa juga menunjukkan ekspansi yang kuat. Sektor Perdagangan, sebagai kontributor PDB terbesar ketiga, tumbuh 5,49% didukung tiga faktor utama: (1) peningkatan arus distribusi barang domestik seiring kenaikan produksi pertanian dan industri pengolahan; (2) kenaikan aktivitas belanja online dan pembayaran elektronik; serta (3) pertumbuhan penjualan sepeda motor. Kinerja Sektor Perdagangan sejalan dan berkaitan dengan beberapa sektor jasa lain, seperti akomodasi dan makan minum serta infokom. Sektor Akomodasi dan Makan Minum tumbuh tinggi 8,41%, didorong oleh mobilitas masyarakat dan perjalanan wisatawan nusantara yang naik signifikan 21,8%. Di saat yang sama, sektor Informasi dan Komunikasi tumbuh 9,65%, didorong oleh pendapatan jasa telekomunikasi, pertumbuhan trafik data, dan meningkatnya transaksi perdagangan elektronik, yang mendukung arah kebijakan menuju ekonomi digital.

Pemerintah terus berupaya menjaga daya beli dan mendukung kinerja dunia usaha. Pemerintah mengalokasikan stimulus Rp34,2 triliun dan meluncurkan 8 program akselerasi senilai Rp15,7 triliun di triwulan IV 2025. Selain itu, investasi dan ekspor bernilai tambah tinggi diperkuat melalui peran Danantara dan pembentukan Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP). Dengan berbagai langkah tersebut, Pemerintah meyakini momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi terus terjaga dan mengarah pada prospek yang semakin solid.

Secara spasial, aktivitas ekonomi tumbuh positif di seluruh wilayah Indonesia. Sulawesi mencatat pertumbuhan tertinggi 5,84%, didorong oleh hilirisasi mineral. Wilayah Jawa tumbuh 5,17%, ditopang oleh kinerja sektor manufaktur dan jasa. Wilayah Sumatera dan Kalimantan masing-masing tumbuh 4,90% dan 4,70%, sementara Bali dan Nusa Tenggara mencatat pertumbuhan 4,71%, sejalan dengan pemulihan pariwisata. Di sisi lain,

Maluku dan Papua tumbuh moderat 2,68%. Dengan pertumbuhan spasial yang positif, kinerja sektor ekonomi, dan dukungan kebijakan fiskal serta nonfiskal yang optimal, Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi lebih solid.

Prospek ekonomi Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan tetap terjaga

Prospek ekonomi Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan tetap terjaga didukung masih tingginya ketidakpastian global dan dinamika perdagangan dunia. Permintaan domestik diperkirakan tetap kuat, didukung kebijakan fiskal yang terarah, serta keberlanjutan berbagai program strategis Pemerintah yang ditujukan untuk menopang ekonomi nasional. Berbagai indikator ekonomi terkini juga menunjukkan bahwa perekonomian domestik masih resilien dengan aktivitas konsumsi dan produksi yang tetap terjaga.

Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga sebagai kontributor terbesar terhadap PDB diperkirakan terus meningkat didukung inflasi yang terkendali, implementasi berbagai program prioritas Pemerintah, dan investasi. MBG, pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), serta dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi penopang. Sementara itu, peningkatan investasi diproyeksikan didukung oleh pelaksanaan program strategis nasional, penyederhanaan birokrasi, serta kemudahan dalam pendirian usaha. Kebijakan hilirisasi yang terus diperluas juga diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah industri domestik sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.

Dari sisi sektor eksternal, kinerja perdagangan Indonesia tahun 2026 diperkirakan masih mencatatkan pertumbuhan positif meskipun perdagangan global mengalami perlambatan. Keberlanjutan program hilirisasi dan peningkatan daya saing produk ekspor bernilai tambah tinggi diharapkan dapat menjaga kinerja ekspor nasional sekaligus memperkuat struktur ekonomi berorientasi pada nilai tambah.

Dari sisi produksi, aktivitas ekonomi nasional diperkirakan tetap berada dalam fase ekspansi.

Sektor manufaktur diproyeksikan tumbuh stabil seiring kuatnya permintaan domestik dan berlanjutnya program hilirisasi. Sektor perdagangan diperkirakan tetap menunjukkan kinerja positif yang ditopang oleh daya beli masyarakat yang terjaga serta dukungan dari kebijakan fiskal. Di sisi lain, sektor pertanian yang mengalami pertumbuhan tinggi pada semester I karena panen raya dan perbaikan distribusi pupuk diperkirakan mengalami normalisasi, namun tetap memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian. Sektor transportasi dan pergudangan juga diperkirakan terus meningkat sejalan dengan mobilitas masyarakat dan distribusi barang yang semakin baik, didukung oleh insentif Pemerintah untuk sektor transportasi dan pariwisata. Adapun sektor pertambangan masih menghadapi tantangan akibat pelemahan harga komoditas dan pembatasan ekspor, meskipun peluang pemulihan tetap terbuka apabila permintaan global kembali membaik.

Indikator ekonomi terkini mengindikasikan bahwa prospek ekonomi nasional tetap resilien. Konsumsi semen domestik pada April 2026 tumbuh 35,6% (yoy), penjualan listrik meningkat 19,0% seiring naiknya konsumsi sektor bisnis dan industri masing-masing 11,9% dan 17,1%, serta penjualan mobil pada Mei 2026 tumbuh 14,0%. Dari sisi persepsi masyarakat, tingkat keyakinan konsumen pada Mei 2026 masih berada pada zona optimis dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 120,9, didukung Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) sebesar 129,7 dan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) sebesar 112,2. Perkembangan tersebut mengindikasikan konsumsi masyarakat dan aktivitas produksi domestik masih terjaga. Pemerintah berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat transformasi struktural guna mewujudkan pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan daya tahan perekonomian nasional terhadap berbagai tantangan global.

Laju inflasi tetap terkendali, namun Pemerintah terus mengantisipasi risiko gejolak harga ke depan

Inflasi pada triwulan II 2026 kembali ke level moderat setelah sempat mengalami tekanan pada awal tahun. Pada April 2026, inflasi tercatat

2,42% (yoy), menurun dari angka Maret 3,48%; dipengaruhi penurunan signifikan pada komponen *administered price* (AP) dan tetap terkendalinya inflasi *volatile food* (VF). Namun demikian, tekanan inflasi pada Mei 2026 kembali meningkat ke 3,08% (yoy), didorong kenaikan seluruh komponen inflasi, terutama VF.

Inflasi inti cenderung berfluktuasi, dipengaruhi penurunan harga emas di April dan tekanan harga komoditas global di Mei. Pada April, turunnya harga emas turut mendorong perlambatan inti dari 2,52% (yoy) menjadi 2,44%. Sementara pada Mei, inflasi inti tercatat meningkat menjadi 2,59% (yoy), didorong oleh tekanan pada harga komoditas global yang memicu kenaikan harga beberapa produk, antara lain telepon seluler dan laptop serta biaya pemeliharaan/service kendaraan bermotor yang disebabkan oleh peningkatan harga bahan baku berbasis minyak (oli) dan biaya impor komponen di tengah dinamika nilai tukar Rupiah. Di sisi lain, harga emas perhiasan menurun sehingga menyumbang deflasi secara bulan ke bulan. Sementara itu, inflasi inti nonemas mencatat kenaikan dari 1,71% (yoy) menjadi 1,91% pada Mei 2026, mengindikasikan mulai dirasakannya dampak rambatan inflasi dari impor (*imported inflation*).

Inflasi komponen harga diatur Pemerintah (AP) juga berfluktuasi pada triwulan II 2026, dipengaruhi hilangnya base effect kebijakan diskon listrik pada awal 2025 serta kenaikan harga avtur dan beberapa jenis BBM nonsubsidi. Pada April, inflasi AP menurun menjadi 1,53% (yoy) dan kembali meningkat menjadi 2,07% pada Mei 2026 disebabkan tekanan inflasi pada kelompok transportasi. Peningkatan harga avtur menjadi faktor utama penyesuaian tarif angkutan udara. Selain itu, naiknya beberapa jenis BBM nonsubsidi dipengaruhi tekanan harga minyak mentah dunia yang masih bertahan tinggi.

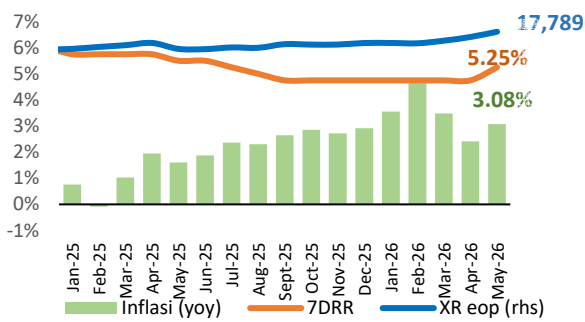
Sejalan dengan inflasi komponen inti dan AP, inflasi komponen harga bergejolak (VF) pada triwulan II 2026 juga berfluktuatif. Pada April, inflasi VF tercatat sebesar 3,37% (yoy), melambat dibandingkan bulan Maret (4,24%>) dipengaruhi turunnya harga daging dan telur ayam ras serta aneka cabai. Penurunan sebagian harga dipengaruhi oleh normalisasi permintaan pasca

Ramadan dan Idulfitri. Namun, pada Mei inflasi VF kembali meningkat menjadi 6,24% (yoy) didorong kenaikan harga cabai dan bawang merah seiring penurunan produksi akibat cuaca ekstrem. Peningkatan harga yang terjadi lebih tinggi dibandingkan tahun sehingga mendorong inflasi VF naik cukup tajam. Meskipun begitu, secara bulan ke bulan masih terjadi penurunan harga daging dan telur ayam ras serta bawang putih karena melimpahnya pasokan.

Pemerintah terus berkomitmen mengendalikan inflasi untuk mengantisipasi dampak rambatan dari gejolak ekonomi global. Untuk meredam tekanan inflasi pangan, Pemerintah menempuh berbagai kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Beberapa kebijakan utama yang dilakukan yakni intervensi harga pangan, fasilitasi distribusi, operasi pasar, pasar murah, serta penyaluran bantuan pangan. Langkah ini bertujuan mencegah peningkatan volatilitas harga pangan dan mendukung akses pangan masyarakat. Pemerintah juga akan memberikan insentif berupa diskon tiket pesawat pada masa liburan sekolah guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di samping terus memastikan harga BBM Subsidi tetap terjangkau bagi masyarakat.

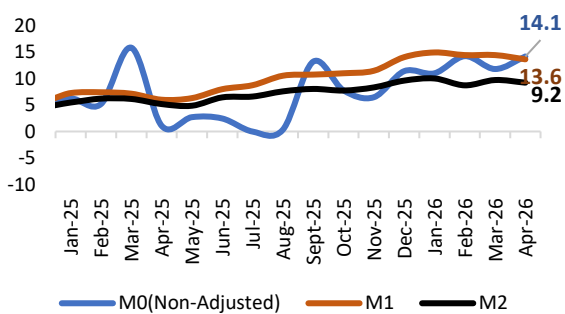
Perkembangan moneter dan nilai tukar

Respons kebijakan moneter telah ditempuh BI untuk menjaga stabilitas makroekonomi di tengah situasi global yang tidak pasti dengan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada Mei 2026, Bank Indonesia menaikkan BI-Rate 50 basis poin menjadi 5,25%, dengan suku bunga *Deposit Facility* dan *Lending Facility* masing-masing menjadi 4,25% dan 6,00%. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga stabilitas Rupiah di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, sekaligus mendukung pencapaian sasaran inflasi pada kisaran 2,5±1%. Selain itu, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan melalui stabilisasi nilai tukar, pengelolaan likuiditas yang memadai, serta penguatan sinergi kebijakan dengan Pemerintah guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pembiayaan aktivitas ekonomi. Dukungan likuiditas kepada sektor prioritas terus diperkuat melalui kebijakan makroprudensial yang akomodatif.

GRAFIK 13**Suku Bunga, Inflasi dan Nilai Tukar**

Sumber: BI, BPS, diolah

Likuiditas tetap memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi. Uang primer (M0) pada April 2026 tumbuh 14,1% (yoy), didorong peningkatan uang kartal yang beredar serta pertumbuhan giro bank umum di Bank Indonesia. Sejalan dengan itu, uang beredar dalam arti sempit (M1) tumbuh 13,6%; mencerminkan aktivitas transaksi ekonomi yang tetap kuat. Sementara itu, uang beredar luas (M2) tumbuh 9,2% (yoy), terutama didorong peningkatan tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat dan pertumbuhan kredit perbankan. Kondisi likuiditas yang tetap memadai tersebut mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter dan makroprudensial dalam menjaga stabilitas makroekonomi serta menopang momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

GRAFIK 14**Perkembangan Likuiditas**

Sumber: BI, diolah

Pertumbuhan kredit perbankan terjaga tinggi mendukung aktivitas sektor riil dan konsumsi masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Koordinasi fiskal dan moneter dalam menjaga likuiditas perekonomian dengan pertumbuhan M0 yang dijaga tumbuh *double digit* turut mendorong pertumbuhan kredit. Dukungan likuiditas perbankan melalui penempatan kas Negara pada perbankan turut mendukung

pelonggaran moneter dalam penurunan *cost of fund* ditunjukkan dengan tren suku bunga pasar uang antarbank (PUAB) yang menurun, serta suku bunga deposito dan kredit yang menurun. Kredit bulan April 2026 tumbuh 10,0%, lebih tinggi dibandingkan bulan Maret 2026 tumbuh 9,5% (yoy). Peningkatan aktivitas ekonomi, pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial Bank Indonesia, serta realisasi implementasi program prioritas Pemerintah turut mendukung realisasi pertumbuhan kredit. Fasilitas pinjaman yang belum dicairkan (*undisbursed loan*) mencapai Rp2.551,4 triliun (22,57% dari plafon kredit yang tersedia), tumbuh 10,5% (yoy) meningkat dari pertumbuhan bulan sebelumnya (Mar: 7,3%) dan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit mengindikasikan belum optimalnya penyerapan plafon kredit.

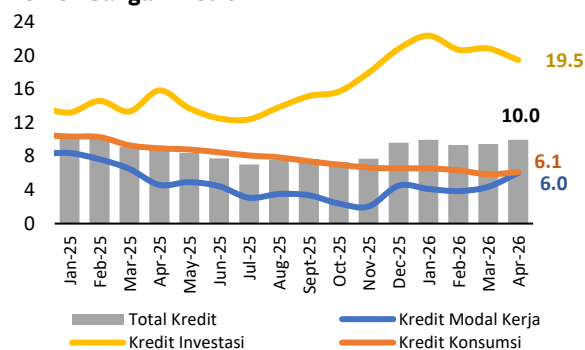
Berdasarkan penggunaan, komponen kredit investasi masih menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit. Kredit investasi bulan Mei tumbuh tinggi 19,5% (yoy) didukung realisasi program Pemerintah dan meningkatnya investasi swasta. Sementara, kredit modal kerja tumbuh 6,0%; menunjukkan tren pertumbuhan yang meningkat, mengindikasikan pembiayaan modal kerja yang mulai mengoptimalkan penggunaan kredit perbankan. Dari sisi konsumsi, pertumbuhan kredit konsumsi tumbuh 6,1% ditopang meningkatnya permintaan rumah tangga dengan fasilitas kredit masih tumbuh tinggi.

Standar penyaluran kredit selama triwulan I 2026 tercatat sebesar 0,15%. Perbankan masih lebih ketat dalam penyaluran kredit namun diperkirakan menjadi lebih longgar pada triwulan II. Pelonggaran penyaluran kredit antara lain pada aspek biaya persetujuan kredit, jangka waktu kredit, dan suku bunga kredit. Ekspektasi pelonggaran standar penyaluran kredit diperkirakan meredam dampak pengetatan kebijakan moneter Bank Indonesia terhadap pertumbuhan kredit. Dengan demikian, upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan sektor keuangan diperkirakan tidak akan secara signifikan menghambat ekspansi kredit. Pertumbuhan kredit akan terus didorong untuk sektor prioritas yang berkontribusi tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi, tentunya

diselaraskan dengan strategi pembangunan Pemerintah dan penciptaan lapangan kerja.

GRAFIK 15

Perkembangan Kredit

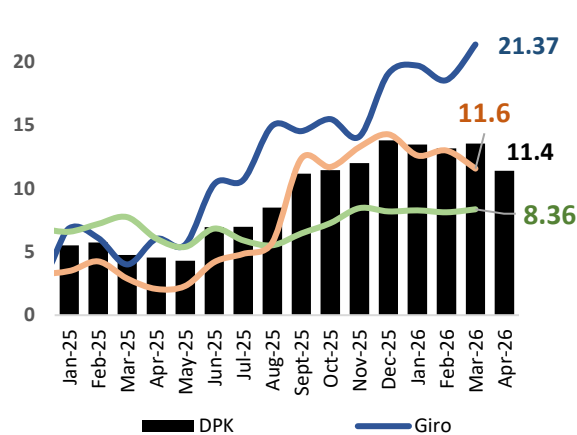


Sumber: OJK, BI (data April), diolah

Pertumbuhan DPK meningkat didominasi simpanan korporasi. DPK perbankan bulan April 2026 tumbuh tinggi 11,4% (yoy), konsisten *double digit* sejak September 2025. Penempatan kas negara oleh Pemerintah di perbankan turut mendukung tingginya pertumbuhan DPK. Berdasarkan komponen, pertumbuhan simpanan berjangka dan giro pada bulan Maret masing-masing 11,6% dan 21,37% (yoy). Tingginya pertumbuhan giro dipengaruhi meningkatnya transaksi oleh korporasi, mengindikasikan tingginya kebutuhan dana dalam waktu dekat untuk mendukung aktivitas bisnis. Sementara itu, tabungan bulan Maret stagnan dengan pertumbuhan 8,4% (yoy), mengindikasikan terbatasnya pertumbuhan pendapatan masyarakat yang dialokasikan dalam bentuk tabungan.

GRAFIK 16

Perkembangan Dana Pihak Ketiga dan Instrumen Perbankan



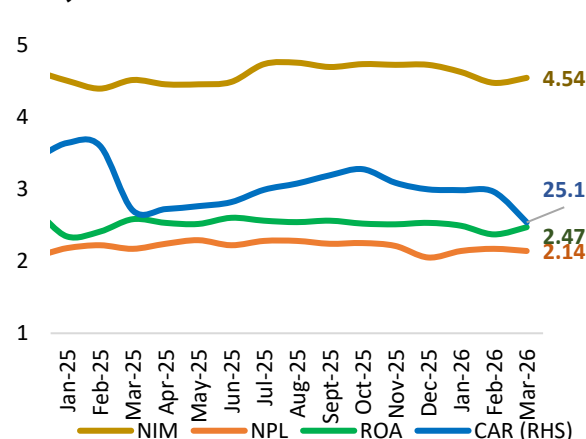
Sumber: OJK, diolah

Ketahanan sistem perbankan memadai didukung likuiditas dan kapasitas permodalan yang tinggi, risiko kredit yang rendah, dan indikator kesehatan perbankan yang berada pada level aman. Rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) bulan April sebesar 25,39%; menunjukkan kapasitas pembiayaan bank yang memadai didorong meningkatnya aktivitas korporasi dan penempatan dana Pemerintah pada perbankan. Kondisi ini juga dipengaruhi implementasi kebijakan makroprudensial yang akomodatif melalui penguatan kebijakan RIM dan KLM oleh Bank Indonesia.

Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan pada Maret 2025 berada di level 25,1%. Level tersebut jauh di atas *threshold* 8% dan *threshold* sesuai profil risiko bank di kisaran 10%-14%, mampu menjadi bantalan untuk memitigasi risiko kredit ke depan. Rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) perbankan terjaga rendah sebesar 2,4%, di bawah *threshold* 5%. Ketahanan perbankan di tengah berbagai risiko global dan domestik ditopang oleh terjaganya kemampuan bayar dan profitabilitas korporasi. Profitabilitas perbankan stabil, tercermin pada *net interest margin* (NIM) dan *return on assets* (ROA) yang *profitable*. Di sisi lain, manajemen risiko perbankan yang *prudent* dan efisiensi operasional yang terus diperbaiki akan memperkuat kinerja perbankan ke depan.

GRAFIK 17

Kinerja Perbankan



Sumber: CEIC, Bloomberg, BI, diolah

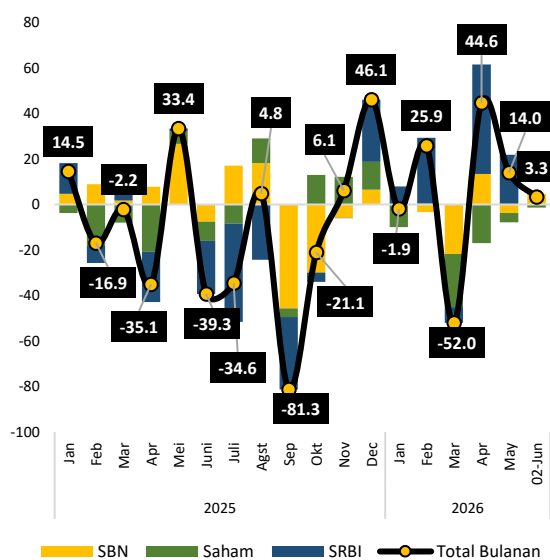
Memasuki triwulan II 2026, dinamika arus modal portofolio Indonesia mulai pulih, meskipun pasar saham masih menghadapi tekanan akibat

sentimen investor. Setelah mencatatkan *outflow* hingga Rp52 triliun pada Maret 2026, arus modal kembali masuk ke Indonesia pada April 2026 sebesar Rp44,6 triliun. Pemulihan ini terutama ditopang oleh masuknya dana asing ke instrumen SBN & SRBI. Perkembangan ini mencerminkan kuatnya minat terhadap instrumen investasi domestik yang menawarkan imbal hasil kompetitif di tengah volatilitas global. Namun demikian, tekanan pada pasar saham masih berlanjut, terutama dipengaruhi *risk off sentiment* dan persepsi investor terhadap kepastian arah kebijakan ekonomi Indonesia ke depan.

Memasuki Mei hingga awal Juni 2026 arus modal asing positif, meskipun dengan nominal yang lebih moderat. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa tekanan pasar tidak sepenuhnya mencerminkan pelemahan fundamental, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sentimen dan sikap *wait and see* investor terhadap prospek pertumbuhan dan konsistensi kebijakan ekonomi. Berlanjutnya *inflow* portofolio pada periode April - Juni terutama ditopang oleh kepercayaan investor terhadap aset *fixed income* domestik. Ke depan, penguatan koordinasi kebijakan, komunikasi kebijakan yang lebih efektif, dan langkah proaktif menjaga likuiditas dan stabilitas pasar diharapkan semakin mendorong pemulihan kepercayaan investor terhadap pasar saham Indonesia.

GRAFIK 18

Perkembangan Aliran Modal (Bulanan)

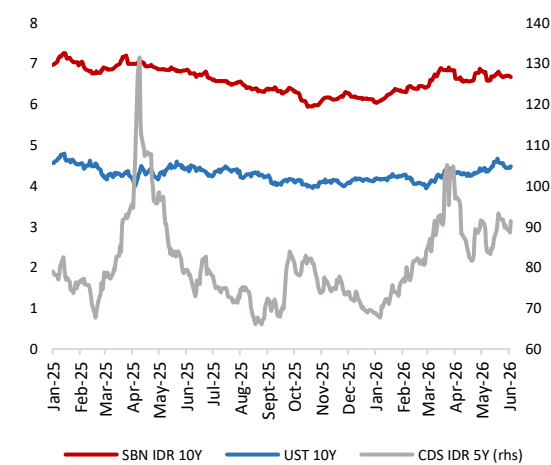


Sumber: CEIC, Bloomberg, BI, diolah

Sejalan dengan dinamika tersebut, pasar obligasi domestik juga mengalami penyesuaian namun tetap menunjukkan resiliensi di sepanjang triwulan II 2026. Yield SBN tenor 10 tahun pada April hingga awal Juni 2026 bergerak di kisaran 6,6 - 6,9%, sedikit meningkat dibanding posisi awal Maret, akibat masih tingginya ketidakpastian global serta penyesuaian premi risiko terhadap aset *emerging markets*. Di saat yang sama, yield UST juga berada di level yang cukup tinggi, di kisaran 4,3 - 4,5%. Situasi ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap pasar obligasi domestik tidak sepenuhnya berasal dari faktor domestik, melainkan juga dipengaruhi oleh *repricing* suku bunga global dan perubahan *risk appetite* investor global. Meskipun demikian, *spread* imbal hasil antara SBN dan UST masih menarik, sehingga menjaga daya tarik bagi investor global. Dari sisi persepsi risiko, CDS Indonesia sempat meningkat pada April 2026 di kisaran 100 bps, namun bergerak lebih rendah dan relatif stabil pada Mei-Juni di kisaran 85-95 bps. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kenaikan premi risiko bersifat sementara dan tidak mencerminkan pelemahan fundamental. Stabilitas pasar SBN, *spread* imbal hasil yang tetap kompetitif, serta moderasi CDS memberikan sinyal potensi penguatan ke depan jika ketidakpastian global mereda serta kepercayaan investor terhadap arah kebijakan Pemerintah meningkat.

GRAFIK 19

Perkembangan Yield SBN, Yield UST dan Credit Default Swap



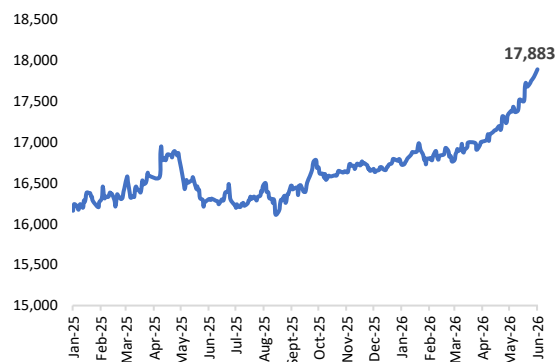
Sumber: Bloomberg, diolah

Berbeda dengan pasar obligasi domestik yang relatif stabil, Rupiah pada triwulan II 2026 masih

terdepresiasi akibat kombinasi faktor eksternal dan faktor musiman tingginya kebutuhan valas. Kurs tengah BI yang pada awal April 2026 masih bergerak di kisaran Rp16.700 – Rp16.900 per dolar AS, secara bertahap melemah hingga mencapai Rp17.883 per dolar AS pada 2 Juni 2026. Tekanan meningkat sejak Mei 2026, seiring berlanjutnya sikap selektif investor global terhadap aset *emerging markets*. Di sisi domestik, permintaan valas juga meningkat untuk kebutuhan pembayaran impor, repatriasi dividen, serta pemenuhan kewajiban eksternal korporasi yang turut menambah tekanan *demand* di pasar valas. Meskipun demikian, tekanan Rupiah perlu dilihat secara lebih proporsional. Relatif stabilnya pasar SBN, masih berlanjutnya portofolio *inflow*, serta CDS yang tetap terkendali menunjukkan bahwa tekanan nilai tukar tidak bersifat fundamental. Ke depan, ruang stabilisasi Rupiah diharapkan tetap terbuka jika tekanan eksternal mereda dan likuiditas valas domestik kembali meningkat. Di sisi lain, kebijakan fiskal-moneter terus diarahkan untuk memelihara stabilitas makroekonomi dan menjaga keyakinan investor sehingga turut mendukung stabilitas pasar keuangan Indonesia.

GRAFIK 20

Perkembangan Nilai Tukar Rupiah (Kurs Tengah BI s.d. 2 Juni 2026)



Sumber: BI, diolah

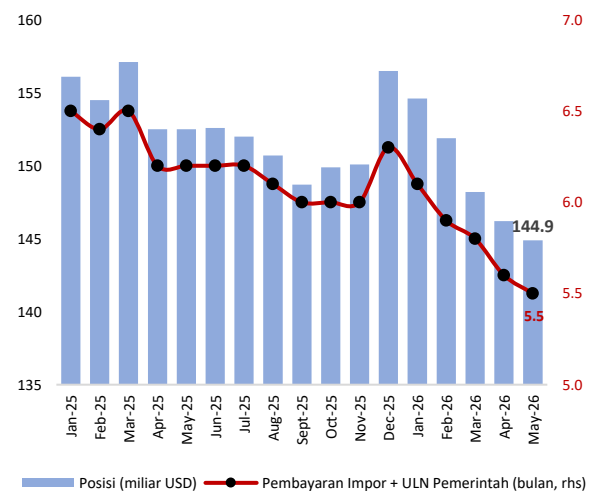
Sebagai tambahan konteks, pada triwulan II 2026 BI merilis data Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) triwulan I 2026 yang menunjukkan pembalikan dari surplus USD6,1 miliar pada triwulan IV 2025 menjadi defisit USD9,1 miliar. Hal ini terutama dipengaruhi oleh kombinasi dari defisit transaksi berjalan yang meningkat menjadi USD4,0 miliar (1,1% PDB), serta transaksi modal dan finansial yang berbalik mejadi defisit USD4,9 miliar. Dari sisi transaksi berjalan, tekanan terutama bersumber dari menyempitnya surplus

perdagangan barang, sejalan dengan impor yang tetap kuat untuk memenuhi permintaan domestik. Sementara itu, ekspor tumbuh lebih lambat akibat turunnya permintaan global dan gangguan rantai pasok. Meskipun demikian, defisit transaksi berjalan masih berada dalam level terkendali dan konsisten dengan pola ekonomi. Investasi langsung masih mencatatkan surplus, mengindikasikan bahwa minat investor terhadap prospek jangka menengah Indonesia tetap terjaga meski volatilitas pasar keuangan global meningkat. Ke depan, Bank Indonesia juga memperkirakan defisit transaksi berjalan 2026 tetap rendah dalam kisaran 0,5–1,3% PDB.

Sejalan dengan perkembangan aliran modal dan nilai tukar Rupiah, posisi cadangan devisa Indonesia menurun dari USD151,9 miliar pada Februari 2026 menjadi USD144,9 miliar pada Mei 2026. Penurunan antara lain dipengaruhi kebutuhan untuk stabilisasi Rupiah dan pembayaran kewajiban luar negeri Pemerintah. Meskipun demikian, level tersebut tetap berada pada tingkat yang memadai, setara dengan pembiayaan 5,6 bulan impor atau 5,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, jauh di atas standar kecukupan internasional. Ke depan, ketahanan eksternal Indonesia perlu terus didukung oleh penguatan ekspor, pengelolaan impor produktif, stabilisasi arus modal, dan pendalaman likuiditas valas domestik.

GRAFIK 21

Cadangan Devisa



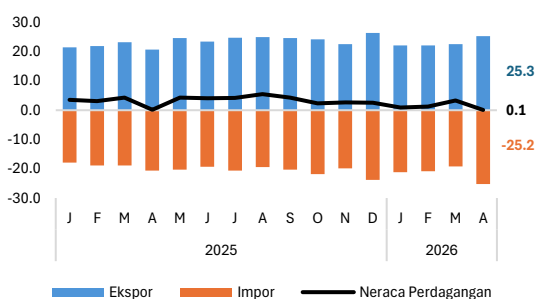
Sumber: BI, diolah

Surplus Neraca Perdagangan Tetap Terjaga di Tengah Dinamika Perdagangan Global

Kinerja perdagangan luar negeri Indonesia pada April 2026 kembali menunjukkan resiliensi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan USD89,1 juta dan berhasil mempertahankan tren surplus selama 72 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Capaian ini menunjukkan bahwa sektor eksternal Indonesia tetap berada dalam kondisi yang baik meskipun menghadapi dinamika perdagangan global yang penuh ketidakpastian.

GRAFIK 22

Neraca Perdagangan (USD Miliar)



Sumber: BPS (diolah)

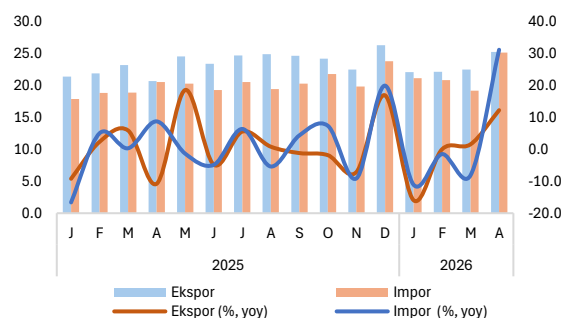
Nilai ekspor Indonesia mencapai USD25,30 miliar, meningkat 12,32% (mtm) dan tumbuh 21,98% (yoy). Secara kumulatif, ekspor Januari-April 2026 mencapai USD92,15 miliar atau meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kinerja tersebut terutama didukung oleh ekspor nonmigas yang mencapai USD87,74 miliar dengan industri pengolahan sebagai kontributor utama pertumbuhan. Hal ini mengindikasikan bahwa transformasi struktural melalui penguatan sektor manufaktur dan hilirisasi masih memberikan dampak positif terhadap daya saing ekspor Indonesia.

Di sisi lain, nilai impor tercatat sebesar USD25,21 miliar, meningkat 31,28% (mtm) dan tumbuh 22,49% (yoy). Secara kumulatif, impor Januari-April 2026 mencapai USD86,51 miliar atau meningkat 13,40% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meskipun kenaikan impor menyebabkan surplus perdagangan menyempit, komposisi impor menunjukkan perkembangan yang konstruktif bagi perekonomian domestik.

Sebagian besar impor Indonesia didominasi oleh bahan baku dan barang penolong yang mencapai 71,45% dari total impor, serta barang modal sebesar 19,78%. Perkembangan ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih berada dalam fase ekspansi, ditopang oleh permintaan domestik yang kuat. Kenaikan impor bahan baku dan barang modal merupakan sinyal positif karena berpotensi mendorong peningkatan output industri, investasi, dan penciptaan lapangan kerja pada periode berikutnya. Dalam konteks tersebut, penyempitan surplus perdagangan pada April 2026 lebih mencerminkan meningkatnya kebutuhan ekonomi domestik dibandingkan pelemahan fundamental sektor eksternal.

GRAFIK 23

Ekspor Impor (nilai dan pertumbuhan yoy)



Sumber: BPS (diolah)

Dari sisi struktur neraca perdagangan, sektor nonmigas tetap menjadi penopang utama dengan surplus USD3,53 miliar. Kinerja ini menunjukkan bahwa daya saing produk ekspor Indonesia masih terjaga di pasar internasional. Di tengah perlambatan perdagangan global dan meningkatnya kecenderungan proteksionisme di sejumlah negara. Kemampuan Indonesia mempertahankan surplus nonmigas yang kuat menjadi pencapaian yang patut diapresiasi.

Sementara itu, defisit sektor migas sebesar USD3,44 miliar masih menjadi faktor utama yang menekan surplus perdagangan. Tingginya impor energi mencerminkan kebutuhan domestik yang terus meningkat untuk menopang aktivitas ekonomi. Kondisi ini sekaligus menggarisbawahi pentingnya upaya jangka menengah dan panjang untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi domestik, pengembangan energi terbarukan, serta peningkatan efisiensi konsumsi energi.

Secara kumulatif, Indonesia masih membukukan surplus perdagangan USD5,64 miliar selama Januari - April 2026. Surplus ini tetap memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas sektor eksternal, termasuk dalam menjaga ketahanan neraca pembayaran dan mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah. Keberhasilan mempertahankan surplus selama enam tahun berturut-turut juga menunjukkan bahwa sektor perdagangan Indonesia memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap perubahan kondisi ekonomi global.

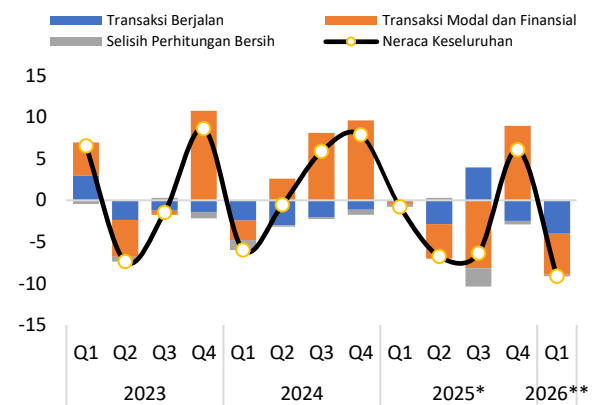
Ke depan, prospek perdagangan Indonesia tetap menjanjikan. Permintaan dari mitra dagang utama seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan India masih menjadi sumber pertumbuhan ekspor yang penting. Selain itu, berlanjutnya kebijakan hilirisasi, penguatan industri manufaktur, serta diversifikasi pasar ekspor diharapkan dapat semakin meningkatkan nilai tambah ekspor nasional dan memperkuat ketahanan sektor eksternal.

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia mencatatkan defisit pada level yang *manageable* dan dapat menopang ketahanan sektor eksternal

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mengalami pembalikan arah. Pada triwulan I 2026 NPI mencatatkan defisit sebesar USD9,1 miliar, berbalik arah dari surplus sebesar USD6,1 miliar pada triwulan IV 2025. Pembalikan kinerja NPI didorong oleh neraca transaksi berjalan (NTB) dan neraca transaksi modal dan finansial (NTMF) yang mengalami defisit, di tengah perlambatan ekonomi dan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

GRAFIK 24

Neraca Pembayaran (USD Miliar)



Sumber: BI, diolah

Neraca Transaksi Berjalan (NTB) mencatat defisit namun pada level yang terkendali. Pada triwulan Im2026, NTB mencatatkan defisit USD4,0 miliar (1,1% dari PDB), melebar dibandingkan defisit pada triwulan IV 2025 yang sebesar USD2,5 miliar (0,7% dari PDB). Pelebaran defisit NTB ini didorong oleh turunnya surplus neraca perdagangan barang dan relatif stabilnya surplus neraca pendapatan sekunder seiring dengan kenaikan defisit neraca pendapatan primer dan turunnya defisit neraca jasa.

Surplus neraca perdagangan barang turun. Neraca perdagangan barang pada triwulan I 2026 mencatatkan surplus USD8,0 miliar, lebih rendah dibandingkan surplus triwulan sebelumnya yang sebesar USD10,2 miliar. Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan signifikan pada surplus neraca perdagangan barang nonmigas di tengah penurunan defisit neraca perdagangan barang migas. Penurunan surplus neraca perdagangan barang nonmigas didorong oleh kontraksi ekspor barang nonmigas yang lebih dalam dibandingkan kontraksi impor barang nonmigas, sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan terganggunya rantai pasok perdagangan antar negara. Kontraksi ekspor barang nonmigas terjadi pada beberapa komoditas utama, seperti batu bara, besi dan baja, kendaraan bermotor, logam tidak mengandung besi serta pakaian. Kinerja ekspor barang nonmigas yang kontraktif juga didorong oleh penurunan ekspor ke negara-negara tujuan utama ekspor, seperti Amerika Serikat, Malaysia, Filipina, dan Korea Selatan. Sementara itu, penurunan defisit neraca perdagangan migas dibandingkan dengan periode sebelumnya

terutama didorong oleh kenaikan ekspor minyak di tengah penurunan impor minyak akibat kenaikan harga minyak dunia.

Defisit neraca jasa menyempit. Pada triwulan I 2026, neraca jasa mencatatkan defisit USD4,6 miliar, lebih rendah dibandingkan defisit pada triwulan IV 2025 (USD5,3 miliar). Penurunan defisit neraca jasa dipengaruhi menyempitnya defisit jasa bisnis lainnya, jasa asuransi, dan jasa telekomunikasi yang dibarengi dengan penurunan surplus jasa perjalanan dan meningkatkan defisit jasa transportasi. Penurunan surplus jasa perjalanan disebabkan oleh penurunan penerimaan jasa perjalanan dari wisatawan mancanegara (wisman) dan penurunan jumlah kunjungan wisman di tengah kenaikan aktivitas wisatawan nasional (wisnas) ke luar negeri. Dalam triwulan I 2026 penerimaan jasa wisman mencapai USD4,0 miliar, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2025 sebesar USD4,5 miliar seiring dengan penurunan jumlah kunjungan dari 4,0 juta hanya menjadi 3,4 juta kunjungan. Di sisi lain, kenaikan defisit jasa transportasi terutama dipengaruhi oleh pelebaran defisit jasa transportasi penumpang akibat disrupsi penerbangan antarnegara seiring dengan meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Sementara itu, defisit jasa transportasi barang (*freight*) menunjukkan penurunan sejalan dengan penurunan aktivitas impor.

Defisit neraca pendapatan primer sedikit melebar, surplus neraca pendapatan sekunder stabil. Neraca pendapatan primer pada triwulan I 2026 mencatatkan defisit USD9,2 miliar, sedikit lebih tinggi dibandingkan defisit pada triwulan IV 2025 yang sebesar USD9,1 miliar. Peningkatan defisit didorong kenaikan pembayaran imbal hasil atas investasi asing di Indonesia, terutama pada portofolio. Sementara itu, neraca pendapatan sekunder pada triwulan I 2026 mencatatkan surplus USD1,8 miliar, stabil dibandingkan surplus pada triwulan IV 2025. Hal ini ditopang oleh penerimaan transfer personal berupa remitansi yang stabil sejalan dengan jumlah pekerja migran

Indonesia (PMI) di luar negeri yang tetap terjaga sebanyak 4,2 juta pekerja.

Neraca transaksi modal dan finansial mencatatkan defisit. Pada triwulan I 2026 neraca transaksi modal dan finansial (NTMF) defisit USD4,9 miliar (0,1% PDB), berbalik arah dibandingkan triwulan IV 2025 yang surplus USD9,0 miliar (1,3% dari PDB). Pembalikan ini terutama dipengaruhi oleh aliran modal keluar (*net outflows*) dari investasi lainnya seiring, di samping penurunan surplus investasi langsung dan investasi portofolio. Investasi lainnya pada triwulan I 2026 mencatatkan defisit USD7,8 miliar, berbalik dari posisi surplus USD1,0 miliar pada triwulan IV 2025. Pembalikan arah dipengaruhi oleh *net outflow* berupa penempatan bank pada aset di luar negeri, terutama dalam bentuk kas dan simpanan untuk membiayai kebutuhan transaksi serta penarikan utang luar negeri sektor swasta terutama dalam bentuk utang dagang. Di sisi lain, investasi langsung pada triwulan I 2026 mencatatkan surplus USD2,0 miliar, lebih rendah dibandingkan surplus pada triwulan IV 2025 (USD3,2 miliar). Penurunan ini terjadi akibat menurunnya *net inflows* pada instrumen ekuitas dan surat utang. Investasi portofolio pada triwulan I 2026 juga mencatatkan surplus USD0,7 miliar, turun dibandingkan surplus triwulan IV 2025 (USD4,7 miliar). Penurunan ini didorong oleh peningkatan premi risiko akibat ketidakpastian pasar keuangan global.

Cadangan devisa masih tetap memadai dan berada di atas standar kecukupan internasional. Secara keseluruhan, dengan kinerja NPI tersebut, posisi cadangan devisa pada Maret 2026 mencapai USD148,2 miliar, setara dengan pembiayaan 5,8 bulan pembayaran impor dan utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional (*threshold*) 3 bulan impor. Dengan posisi cadangan devisa yang relatif masih tinggi diharapkan dapat mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

TABEL 1

Perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia (dalam Miliar USD)

	2022	2023	2024					2025					2026
			Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1*	Q2*	Q3*	Q4*	Total	Q1**
Transaksi Berjalan	13,22	-2,04	-2,42	-3,00	-2,02	-1,14	-8,58	-0,15	-2,86	3,97	-2,48	-1,52	-4,01
A. Barang	62,67	46,27	9,33	10,01	9,20	11,30	39,84	13,07	10,52	16,03	10,23	49,85	7,98
- Ekspor, fob	292,54	257,68	61,94	62,32	67,50	71,33	263,09	65,95	67,98	73,93	72,58	280,43	66,42
- Impor, fob	-229,87	-211,41	-52,61	-52,32	-58,30	-60,02	-223,25	-52,88	-57,46	-57,89	-62,35	-230,58	-58,45
a. Nonmigas	87,45	66,19	14,83	14,64	13,65	16,36	59,48	17,75	14,72	20,94	15,98	69,39	13,30
b. Migas	-24,78	-19,92	-5,51	-4,64	-4,45	-5,05	-19,65	-4,69	-4,20	-4,91	-5,74	-19,54	-5,32
B. Jasa - jasa	-19,96	-17,68	-4,21	-4,98	-4,19	-5,11	-18,49	-5,48	-5,27	-4,37	-5,35	-20,47	-4,58
C. Pendapatan Primer	-35,30	-36,01	-8,84	-9,46	-8,56	-8,96	-35,82	-9,29	-9,79	-9,43	-9,12	-37,63	-9,15
D. Pendapatan Sekunder	5,80	5,38	1,30	1,43	1,52	1,62	5,88	1,55	1,68	1,73	1,75	6,72	1,75
Transaksi Modal dan Finansial	-8,68	9,87	-2,36	2,61	8,12	9,62	17,98	-0,30	-4,16	-8,17	8,97	-3,66	-4,92
1. Investasi Langsung	18,07	14,42	4,82	2,35	5,14	3,57	15,88	2,81	3,94	4,45	3,15	14,35	2,02
2. Investasi Portofolio	-11,63	2,21	-2,09	3,08	9,77	-2,53	8,24	1,04	-8,06	-7,05	4,70	-9,37	0,73
3. Derivatif Finansial	0,05	0,17	-0,42	0,39	0,33	-0,01	0,29	0,19	-0,02	-0,18	-0,04	-0,05	0,12
4. Investasi Lainnya	-15,64	-6,95	-4,70	-3,26	-7,18	8,43	-6,71	-4,38	-0,09	-5,46	0,98	-8,95	-7,80
Total	4,53	7,83	-4,78	-0,39	6,10	8,47	9,40	-0,45	-7,03	-4,20	6,49	-5,19	-8,93
Selisih Perhitungan Bersih	-0,54	-1,53	-1,19	-0,17	-0,23	-0,60	-2,19	-0,34	0,28	-2,18	-0,42	-2,66	-0,21
Neraca Keseluruhan	4,00	6,30	-5,97	-0,56	5,87	7,87	7,21	-0,79	-6,74	-6,38	6,07	-7,84	-9,15
Memorandum :													
Posisi Cadangan Devisa	137,23	146,38	140,39	140,18	149,92	155,72	155,72	157,09	152,57	148,74	156,47	156,47	148,15
Dalam bulan Impor dan pembayaran utang luar negeri	5,90	6,51	6,21	6,14	6,40	6,47	6,47	6,46	6,15	5,97	6,22	6,22	5,79
Transaksi Berjalan (% PDB)	1,00	-0,15	-0,72	-0,88	-0,57	-0,32	-0,61	-0,04	-0,79	1,07	-0,67	-0,11	-1,09

Sumber: BI, diolah

Realisasi APBN Terus Menunjukkan Tren Positif

Penerimaan negara hingga Mei 2025 masih terjaga di tengah tekanan global

Realisasi APBN hingga Mei 2026 menunjukkan tren positif. Kinerja Pendapatan Negara tumbuh kuat 19,1% (yoy) dengan realisasi mencapai Rp1.185,0 triliun (37,6% dari APBN), ditopang oleh akselerasi Penerimaan Perpajakan Rp958,2 triliun (18,9% yoy) serta PNBPN yang mencapai Rp226,4 triliun (19,9% yoy). Di sisi lain, Belanja Negara terealisasi lebih cepat dengan tumbuh 34,4% (yoy) mencapai Rp1.365,4 triliun (35,5% dari APBN), didorong oleh ekspansi pada Belanja Pemerintah Pusat yang tumbuh 52,6% (yoy) serta Transfer ke Daerah yang mencapai 44,2% dari target APBN 2026. Dengan capaian tersebut, posisi Keseimbangan Primer mencatatkan surplus Rp58,6 triliun, sementara defisit tercatat sebesar Rp180,4 triliun atau sekitar 0,70% dari PDB. Posisi tersebut mengindikasikan pengelolaan fiskal tetap terjaga dan terukur di batas yang terkendali.

Pendapatan Negara berhasil tumbuh kuat sebesar 19,1% secara year-on-year dengan realisasi mencapai Rp1.185,0 triliun atau setara dengan 37,6% dari target APBN 2026. Penopang utama pendapatan ini berasal dari Penerimaan Perpajakan yang terealisasi sebesar Rp958,2 triliun (35,6% dari target; tumbuh 18,9%), di mana Penerimaan Pajak menyumbang Rp834,4 triliun dengan pertumbuhan 22,1%, sementara sektor Kepabeanan & Cukai berkontribusi Rp123,8 triliun dengan pertumbuhan 0,7%. Selain itu, kinerja PNBPN juga menunjukkan akselerasi sebesar Rp226,4 triliun (49,3% dari target) serta tumbuh 19,9%.

Penerimaan Pajak sampai dengan Mei 2026 tumbuh kuat sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi. Penerimaan pajak tumbuh sebesar 22,1% (yoy) dengan realisasi neto mencapai Rp834,4 triliun (naik dari Rp683,3 triliun pada 2025) atau setara dengan 35,4% dari target APBN 2026. Laju pertumbuhan hingga Mei ini terakselerasi lebih tinggi dibandingkan posisi s.d. April yang tumbuh 16,1%, sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi, daya beli yang terjaga, serta semakin baiknya implementasi Coretax. Penguatan ini ditopang oleh kinerja PPN & PPnBM sebagai pajak konsumsi yang

tumbuh tinggi 41,3% (yoy) atau mencapai Rp315,7 triliun, diikuti oleh ekspansi pada PPh Badan dan Deposit PPh Badan yang tumbuh 23,9%, serta PPh Orang Pribadi dan PPh 21 yang tumbuh 26,0%, mencerminkan kondisi penghasilan badan dan masyarakat yang positif. Sementara itu, komponen PPh Final, PPh 22, dan PPh 26 juga menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 5,2% (yoy).

Sektor-sektor utama yang berkontribusi besar pada penerimaan pajak berhasil mencatatkan pertumbuhan yang kuat. Sektor Perdagangan menjadi penopang terbesar dengan porsi kontribusi mencapai 25,5% dan tumbuh tinggi sebesar 52,4% (yoy), dipengaruhi aktivitas subsektor perdagangan besar BBM dan perdagangan online sejalan dengan tren masyarakat dalam berbelanja secara online. Sektor Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 23,6% dan tumbuh 19,7%, utamanya ditopang oleh subsektor industri minyak kelapa sawit yang mengalami peningkatan profitabilitas. Selanjutnya, sektor Pertambangan menyumbang kontribusi sebesar 9,1% dengan pertumbuhan 28,2% yang didorong oleh sektor pertambangan migas. Pertumbuhan yang kuat ini juga diikuti oleh sektor-sektor lainnya seperti Pengangkutan & Pergudangan (16,8%), Jasa Perusahaan (16,3%), serta Konstruksi & Real Estat (7,4%), mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi domestik.

Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai meningkat dan menunjukkan sinyal pemulihan yang kuat dengan total capaian hingga Mei 2026 mencapai Rp123,8 triliun atau setara dengan 36,8% dari target APBN. Perbaikan performa ini ditopang oleh kinerja Cukai yang mencapai Rp90,4 triliun, didorong oleh peningkatan produksi hasil tembakau pada triwulan I 2026, serta Bea Masuk yang tumbuh sebesar 9,7% (yoy) atau mencapai Rp21,5 triliun berkat terjaganya aktivitas impor bahan baku dan bahan penolong yang tumbuh hingga 10,67%, mencerminkan aktivitas produksi yang meningkat. Di sisi lain, meskipun pos Bea Keluar masih mencatatkan kontraksi sebesar 8,9%, sektor ini mulai mengalami perbaikan sejalan dengan tren penguatan harga komoditas CPO di

pasar global sejak bulan Maret sampai dengan Mei 2026.

Sampai dengan Mei 2026, upaya penegakan hukum di bidang kepastian dan cukai terus menunjukkan hasil yang signifikan. Penindakan terhadap rokok ilegal telah dilakukan sebanyak 6.880 kali atau meningkat 12,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari penindakan tersebut, berhasil diamankan 865 juta batang rokok ilegal, meningkat sebesar 128,2% (yoy), serta menghasilkan penerimaan melalui mekanisme *ultimum remedium* sebesar Rp61,6 miliar. Di sisi lain, penindakan terhadap tindak pidana narkoba telah dilakukan sebanyak 691 kali dengan total barang bukti yang berhasil diamankan mencapai 3,81 ton. Salah satu capaian penting dalam periode tersebut adalah keberhasilan tim gabungan Polri dan Bea Cukai menggagalkan upaya penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan Indonesia - Papua Nugini.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga 31 Mei 2026 mencapai 49,3% dari target APBN. Angka tersebut tumbuh 26,4% (yoy) apabila tidak memperhitungkan pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) berupa dividen BUMN, atau tumbuh 19,9% (yoy) jika memperhitungkan KND. Pertumbuhan PNBP didukung oleh kinerja PNBP sumber daya alam (SDA) yang tumbuh 15,3% (yoy), terutama berasal dari SDA migas yang meningkat 14,9% seiring kenaikan ICP serta SDA nonmigas yang tumbuh 15,6% didorong oleh kenaikan harga mineral seperti nikel, tembaga, emas, dan perak. Selain itu, PNBP kementerian/lembaga (KL) tumbuh tinggi sebesar 49,4% (yoy), terutama berasal dari peningkatan pendapatan jasa komunikasi dan informasi serta pendapatan denda administratif di bidang kehutanan dari hasil kerja Satgas PKH. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) juga meningkat 26,7% (yoy), terutama ditopang oleh kenaikan pendapatan jasa pelayanan kesehatan pada Kementerian Kesehatan dan peningkatan tarif pungutan ekspor CPO Sawit serta produk turunannya.

Belanja Negara Tumbuh Tinggi Hingga Mei 2026: Pemerintah Upayakan Realisasi Belanja Tepat Waktu, Tepat Sasaran, dan Berdampak ke Masyarakat

Hingga Mei 2026, realisasi Belanja Negara mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 34,4% (yoy), dengan nilai Rp1.365,4 triliun atau 35,5% dari pagu APBN. Realisasi ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah yang masing-masing mencapai Rp1.059,3 triliun dan Rp306,1 triliun. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) telah direalisasikan sebesar 33,6% dari pagu APBN dan diarahkan untuk semakin produktif. Sebagai komponen BPP, realisasi Belanja K/L tumbuh signifikan sebesar 58,9% dengan nominal Rp517,7 triliun. Peningkatan terjadi di semua jenis belanja, termasuk Belanja Barang dan Belanja Modal yang mencapai Rp209,3 triliun dan Rp81,6 triliun atau tumbuh masing-masing sebesar 114,9% dan 46,8%. Sementara itu, Belanja Bantuan Sosial telah mencapai Rp71,7 triliun atau 44,1% dari pagu APBN. Peningkatan belanja K/L ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan program MBG yang telah menjangkau 63,13 juta penerima, penyaluran bantuan sosial (PBI JKN, PKH, Kartu Sembako, dan KIP Kuliah), serta pembayaran THR.

Realisasi belanja subsidi dan kompensasi mencapai Rp203,7 triliun atau sekitar 45,6% dari pagu APBN, menunjukkan peran strategisnya sebagai shock absorber dalam menjaga daya beli masyarakat. Belanja subsidi tercatat sebesar 94,8 triliun dan kompensasi sebesar Rp108,9 triliun. Secara tahunan, realisasi ini tumbuh signifikan sebesar 208,2% (yoy), antara lain dipengaruhi oleh *low-base effect* dan perubahan pola pembayaran kompensasi yang kini dilakukan secara bulanan. Faktor eksternal seperti volatilitas harga energi global dan depresiasi nilai tukar Rupiah turut mempengaruhi realisasi belanja subsidi dan kompensasi. Di saat yang sama, faktor domestik seperti pembayaran uang muka subsidi pupuk dan peningkatan pemakaian BBM, LPG, dan listrik juga turut memberikan dampak terhadap kenaikan subsidi dan kompensasi. Berdasarkan rinciannya, pemanfaatan barang bersubsidi mengalami peningkatan, antara lain BBM tumbuh 8,6%, LPG 3 kg naik 2,7%, listrik bersubsidi meningkat 2,1%, dan pupuk melonjak signifikan hingga 20,7%. Kondisi ini mengonfirmasi peran krusial APBN dalam menjaga stabilitas harga, ketersediaan barang, dan daya beli masyarakat.

Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) berjalan semakin efektif dengan realisasi mencapai Rp306,1 triliun atau 44,2% dari pagu APBN, lebih

tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu (37,0%). Kinerja penyaluran TKD bulan Mei 2026 didorong oleh realisasi DBH, DAU, DAK Nonfisik dan Dana Otonomi Khusus, termasuk kebijakan relaksasi penyaluran dan tambahan alokasi TKD bagi daerah terdampak bencana di Sumatera. Dari tambahan alokasi TKD tahun 2026 sebesar Rp10,65 triliun untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dana yang telah disalurkan mencapai 99,8%. Pemanfaatan TKD memberikan dampak nyata bagi pelayanan publik di daerah, antara lain melalui dukungan pembayaran gaji kepada 4,3 juta ASN Daerah, penyaluran BOS kepada 42,3 juta siswa, BOP kepada 5,8 juta siswa PAUD, dan program kesetaraan kepada 992 ribu siswa, serta pemberian tunjangan kepada 616 ribu guru.

Selain itu **Belanja Negara bekerja secara nyata untuk menjaga daya beli, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat infrastruktur.** Pemerintah terus menjaga daya beli dan perlindungan sosial masyarakat melalui berbagai program prioritas. Hingga 31 Mei 2026, anggaran telah dialokasikan antara lain untuk Kartu Sembako Rp16,7 triliun, PKH Rp14,9 triliun, PBI JKN Rp19,3 triliun bagi 96,7 juta peserta, dan TPG/TPD Non-PNS Rp12,6 triliun. Untuk mendukung pelayanan publik dan stabilitas harga, Pemerintah mengalokasikan Rp88,15 triliun untuk MBG, didukung subsidi energi Rp58,3 triliun, subsidi non-energi Rp36,5 triliun, serta dukungan Bulog Rp22,7 triliun untuk menjaga keterjangkauan harga dan ketahanan pangan. Pembangunan infrastruktur tetap dilanjutkan untuk mendorong produktivitas. Anggaran difokuskan pada jalan dan jembatan Rp7,1 triliun, bendungan dan irigasi Rp3,9 triliun, serta revitalisasi sekolah dan madrasah Rp4,8 triliun guna memperkuat konektivitas, ketahanan pangan, dan kualitas SDM.

Pembiayaan APBN dikelola secara hati-hati dan fleksibel guna menjaga keberlanjutan fiskal

Pembiayaan anggaran sampai dengan Mei 2026 tetap terjaga dan sejalan dengan arah kebijakan fiskal. Pengelolaan pembiayaan dilakukan secara *prudent*, terukur, dan adaptif dengan mempertimbangkan kebutuhan likuiditas Pemerintah, optimalisasi kas, serta dinamika pasar keuangan. Realisasi pembiayaan utang tercatat Rp386,0 triliun atau 46,4% dari target APBN 2026 sebesar Rp832,2 triliun. Capaian ini menunjukkan bahwa strategi pembiayaan berjalan sesuai rencana dengan tetap menjaga risiko utang dalam batas terkendali. Sementara itu, pembiayaan nonutang terealisasi negatif Rp6,5 triliun atau 4,4% dari target negatif Rp143,1 triliun, mencerminkan pelaksanaan yang selektif dan disesuaikan dengan kebutuhan fiskal.

Pelaksanaan pembiayaan didukung oleh kondisi pasar SBN yang relatif stabil di tengah ketidakpastian global. *Yield* SBN 10 tahun terjaga pada kisaran 6,68%, dengan *spread* terhadap US *Treasury* yang relatif rendah dibandingkan sejumlah negara *emerging market*. Minat investor juga tetap memadai, tercermin dari *bid-to-cover ratio* lelang SUN sebesar 1,8 kali dan SBSN sebesar 2,6 kali.

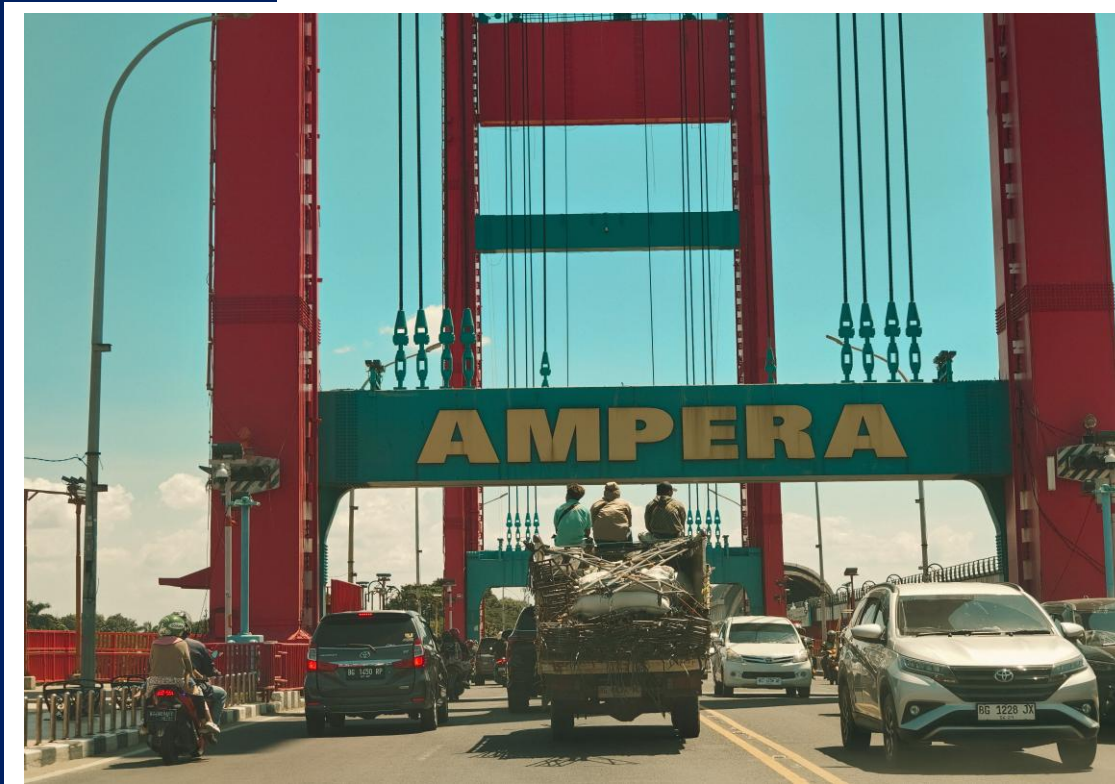
Di sisi pengeluaran investasi, realisasi sampai dengan Mei 2026 mencapai Rp35,45 triliun dan diarahkan untuk mendukung program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat. Alokasi tersebut mencakup pengadaan cadangan beras oleh Bulog sebesar Rp22,73 triliun, pengadaan lahan PSN melalui LMAN sebesar Rp5,58 triliun, Program FLPP sebesar Rp5,00 triliun, *pooling fund* bencana sebesar Rp1 triliun, serta pinjaman daerah melalui PT SMI sebesar Rp1,14 triliun.

Secara keseluruhan, pembiayaan anggaran menunjukkan kinerja yang terkendali dan mendukung keberlanjutan fiskal. Pemerintah akan terus menjaga fleksibilitas strategi pembiayaan untuk mengantisipasi volatilitas pasar keuangan, pergerakan suku bunga, nilai tukar, dan dinamika minat investor, sekaligus memastikan APBN tetap efektif sebagai instrumen stabilisasi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi.

BAGIAN II

ULASAN KHUSUS:

Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Studi Empiris Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan



Gambar Lalu lintas di Jembatan Ampera, Palembang
Sumber: Pexels, foto “Lalu Lintas Jembatan Ampera Palembang”,
diakses dari <https://www.pexels.com/id-id/foto/lalu-lintas-jembatan-ampera-palembang-37914694/> pada 10 Juni 2026.

Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Latar Belakang

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai penyelenggara pelayanan publik dan komitmen untuk mewujudkan Sustainable Development Goals (SDG's) dan Visi Indonesia Emas 2045. Dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja pendidikan sebesar 20% dari total belanja negara. Besaran alokasi tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut World Bank (2020), Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalokasikan anggaran belanja pendidikan tertinggi di dunia, berdasarkan pada proporsi anggaran terhadap total belanja negara. Proporsi anggaran pendidikan Indonesia lebih tinggi dari negara maju di Asia Timur, seperti Jepang dan Korea Selatan, tetapi lebih rendah dari negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Vietnam. Berdasarkan data dari UNDP, Indonesia terklasifikasi sebagai negara dengan "High Human Development" dengan ranking 112 di tahun 2022 yang sebelumnya di ranking 113 di tahun 2021. Di Tingkat nasional, IPM terus mengalami peningkatan dari 72,81 di tahun 2020 menjadi 73,77 di tahun 2022 dan 74,39 di tahun 2023. Realisasi dan pencapaian tersebut seyogyanya tidak hanya tergantung dengan Pemerintah Pusat tetapi peran serta komitmen dari Pemerintah Daerah.

Dalam era desentralisasi fiskal, hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

diwujudkan dalam bentuk transfer ke daerah dan dana desa yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), Dana Alokasi Khusus non Fisik (DAK non Fisik), Dana Otsus, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Pada tahun 2022 Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), jumlahnya mencapai Rp769,61 triliun, terdiri atas transfer ke daerah sebesar Rp701,61 triliun dan dana desa sebesar Rp68,00 triliun. DAK Fisik adalah tranfer ke daerah yang ditujukan sebagai pendukung (*supporting*) terhadap APBD dalam memenuhi kebutuhan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana fisik layanan publik dan/atau mendukung pencapaian prioritas nasional. Pada TA 2022, DAK terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu DAK Reguler dan DAK Penugasan. DAK Fisik Reguler dengan total alokasi sebesar Rp47.421 Miliar (77,9% dr total DAK Fisik) mempunyai tujuan untuk mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimum, yang terdiri dari 6 (enam) bidang yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan KB, Bidang Jalan, Bidang Air Minum, Bidang Sanitasi, dan Bidang Perumahan dan Permukiman.

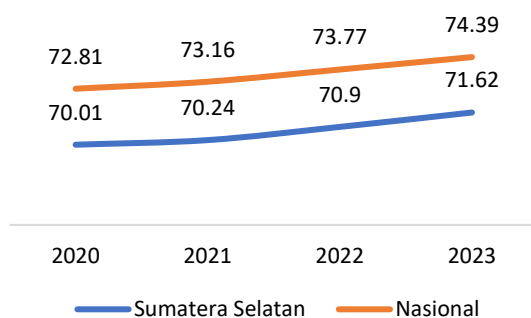
Ukuran keberhasilan dari alokasi dan penyerapan transfer ke daerah khususnya DAK untuk pemenuhan standar pelayanan minimum, antara lain terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia yang terus mengalami peningkatan. Beberapa penelitian terkait dengan belanja pemerintah bidang Pendidikan dan Kesehatan di Indonesia, IPM, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa adanya pengaruh di antara variable-variabel tersebut (Tambunan, 2019, Mongan 2019,

Palayukan 2019, Fajar dan Indrawati 2020, Febianto, Wicaksono, Reynaldi 2021, Pratama dan Sumiryati 2023).

Provinsi Sumatera Selatan, merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terus mengalami kenaikan IPM dari 70,01 di tahun 2020 dan 71,62 di tahun 2023, meskipun IPM Provinsi Sumsel masih lebih rendah dari IPM Nasional, namun menunjukkan bahwa ada perbaikan perkembangan kualitas SDM.

GRAFIK 25

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: BPS, 2024

Di sisi lain, nilai Pagu DAK fisik bidang Pendidikan di Sumsel selama periode 2020 – 2024 menunjukkan penurunan, sementara untuk DAK fisik bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) cenderung fluktuatif.

Berdasarkan fenomena di atas, ulasan ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari DAK Fisik bidang Pendidikan dan bidang Kesehatan dan KB terhadap IPM di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan asumsi bahwa output dari pekerjaan fisik baru dapat dimanfaatkan oleh publik setelah pekerjaan selesai, maka dalam penelitian ini digunakan “time lag” atau periode sebelumnya untuk DAK fisik.

Tinjauan Pustaka

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sementara itu, sesuai dengan sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang dimaksud DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. Dalam UU HKPD tersebut, DAK dibagi menjadi DAK fisik, DAK nonfisik, serta komponen baru yaitu hibah ke daerah. Dalam UU HKPD, komponen DAK fisik yang bersifat reguler dilebur ke DAU karena bersifat mendukung pelaksanaan pelayanan umum.

Beberapa penelitian yang menguji dan menganalisis pengaruh belanja pemerintah terhadap IPM dilakukan antara lain oleh Mongan, J. J. S. (2019) yang meneliti tentang pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia, menemukan bahwa pengeluaran belanja pemerintah pusat dalam pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Pengeluaran pemerintah pusat dalam sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah daerah dalam pendidikan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sementara pengeluaran pemerintah daerah di sektor kesehatan memiliki efek negatif dan signifikan. Fajar dan Indrawati (2020) yang meneliti tentang Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Perumahan Dan Fasilitas Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur) dan menemukan bahwa secara simultan ketiga belanja tersebut mempengaruhi IPM sebesar 37,2%, namun secara parsial hanya belanja Pendidikan yang mempengaruhi IPM. Febianto, Wicaksono, Reynaldi (2021) yang meneliti pengaruh Dana Alokasi Khusus untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, dengan menggunakan Indeks Kesenjangan Kemiskinan (P1) sebagai proksi tingkat kemiskinan, menemukan bahwa Dana Alokasi Khusus untuk Pendidikan dan Kesehatan memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, tetapi Dana Alokasi Khusus untuk

Infrastruktur memiliki dampak positif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan. Kurnia.et.all (2023) yang meneliti tentang “*The Influence of Government Spending in Education, Health, and Economics on Indicators for Calculation of Human Development Index in Bangka Belitung Islands Province*”, membuktikan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan belanja pemerintah untuk Pendidikan untuk tahun yang sama dan tahun sebelumnya terhadap rata-rata lama sekolah dan pengaruh negatif dan signifikan belanja pemerintah untuk Pendidikan terhadap ekspektasi lama sekolah, ada pengaruh positif dan signifikan belanja pemerintah untuk Kesehatan di tahun yang sama dan tahun sebelumnya terhadap ekspektasi hidup, pengaruh negative dan signifikan belanja pemerintah untuk ekonomi per kapita untuk tahun yang sama dan tahun sebelumnya terhadap belanja per kapita. Purnomoratih dan Ramadhani (2023) yang meneliti tentang Peran Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi terhadap Pembangunan SDM di Kalimantan Selatan menemukan bahwa belanja daerah untuk pendidikan berpengaruh signifikan namun kontraproduktif terhadap pembentukan indeks pembangunan manusia (IPM), belanja fungsi kesehatan, baik pusat dan daerah, sama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembangunan kualitas SDM Kalimantan Selatan, belanja pusat untuk fungsi ekonomi lebih berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembentukan IPM Kalimantan Selatan dibandingkan belanja daerah.

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu, perbedaan kajian ini terletak kepada pengaruh dari DAK Fisik tahun sebelumnya terhadap IPM di tahun berjalan.

Metode Penelitian

Tulisan ini menganalisis variabel DAK Kesehatan dan DAK Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan selama tahun 2021-2023 di 17 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Teknik analisis yang digunakan teknik analisis kuantitatif, untuk menjawab pengaruh variabel DAK Kesehatan dan DAK Pendidikan terhadap IPM. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda data

panel. Adapun persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$IPM_{it} = \alpha + \beta_1 Kesehatan_{it-1} + \beta_2 Pendidikan_{it-1} + e_{it} \dots\dots (1)$$

Dimana, IPM adalah Indeks Pembangunan Manusia. Kesehatan adalah Dana Alokasi Khusus Kesehatan. Pendidikan adalah Dana Alokasi Khusus Pendidikan. e adalah tingkat error. i adalah kabupaten/kota. t adalah periode tahun t. t-1 adalah tahun sebelumnya (*lagged*). α adalah nilai konstanta. β_1, β_2 adalah koefisien.

Pada regresi data panel terdapat tiga model estimasi diantaranya *common effect model*, *fixed effect model* dan *random effect model*. Untuk menentukan model estimasi terbaik dalam analisis regresi dilakukan pengujian pemilihan model melalui Uji Chow dan Uji Hausman. Kemudian uji statistik untuk menganalisis hubungan variabel secara statistik.

Hasil dan Analisis

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil Uji Chow, nilai probabilitas sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05) menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara model *Common Effect* dan model lainnya, sehingga model *Fixed Effect* dianggap lebih sesuai

Tabel 2

Pemilihan Model Terbaik

Variables	Random Effect Model			Best Model Selection			
	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob	Chow Test	Hausman Test	Breusch Pagan Test
Kesehatan	0.3110	4.3202	8.7138	0.0016***	0.0000***	1.0000	0.0000***
Pendidikan	1.0171	0.0926	3.3563	0.0000***			
C	37.6462	0.1159	8.7755	0.0000***			
Adj R2	0.2561						
Prob-F	0.0003***						

Catatan: ***, **, dan * masing-masing menunjukkan tingkat signifikansi 1%, 5%, dan 10%
 Sumber: Data Diolah, 2024

Selanjutnya, hasil Uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas sebesar 1,000 (lebih besar dari 0,05), yang menunjukkan bahwa model *Random Effect* lebih tepat digunakan. Karena terdapat perbedaan hasil antara kedua uji tersebut, dilakukan pengujian tambahan menggunakan uji LM (*Breusch-Pagan Test*), yang menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,000. Berdasarkan hasil uji

LM, model yang dipilih adalah *Random Effect Model*.

Berdasarkan hasil estimasi *Random Effect Model* yang terdapat pada Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa variabel Kesehatan memiliki koefisien sebesar 0.3110, yang menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap variabel dependen. Hasil uji *t-Statistic* yang sebesar 8.7138 dan nilai probabilitas (Prob) 0.0016, yang lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa pengaruh variabel Kesehatan signifikan pada tingkat signifikansi 1%. Begitu pula dengan variabel Pendidikan, yang memiliki koefisien sebesar 1.0171, menunjukkan pengaruh positif terhadap variabel dependen, dengan *t-Statistic* sebesar 3.3563 dan nilai Prob sebesar 0.0000, yang juga signifikan pada tingkat signifikansi 1%. *Intercept model* (C) memiliki koefisien sebesar 37.6462, dengan *t-Statistic* 8.7755 dan nilai Prob sebesar 0.0000, yang menandakan bahwa *intercept* juga berpengaruh signifikan.

Nilai *Adj R²* sebesar 0.2561 menunjukkan bahwa model ini mampu menjelaskan sekitar 25,61% variasi dari variabel dependen, yang mengindikasikan bahwa meskipun tidak sangat tinggi, model ini masih cukup baik dalam menjelaskan variabilitas. Selain itu, nilai *Prob-F* sebesar 0.0003, yang lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa model ini secara keseluruhan signifikan dan layak digunakan.

Tabel 3

Nilai *Intercept* Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Nilai Intercept
1	Banyuasin	35.49971
2	Empat Lawang	33.7729
3	Lahat	36.24666
4	Muara Enim	37.60611
5	Muba	35.84917
6	Musi Rawas	35.41779
7	Musi Rawas Utara	34.20113
8	Ogan Ilir	35.66053
9	OKI	35.94852
10	OKU	38.65868
11	OKU Selatan	34.04673
12	OKU Timur	38.16972
13	PALI	34.74674
14	Lubuk Linggau	44.60028
15	Pagar Alam	38.7667
16	Palembang	46.79554
17	Prabumulih	43.99934

Sumber: Data diolah, 2024

Nilai *intercept* ini menggambarkan kondisi IPM dasar sebelum adanya pengaruh dari Dana Alokasi Khusus Kesehatan dan Pendidikan pada tahun sebelumnya. Secara umum, daerah dengan nilai *intercept* yang lebih tinggi menunjukkan IPM yang lebih baik, sedangkan nilai *intercept* yang lebih rendah mencerminkan kondisi IPM yang lebih rendah tanpa adanya intervensi dari kebijakan atau alokasi dana tersebut.

Kabupaten/kota seperti Palembang (46.795535) dan Lubuklinggau (44.600275) memiliki nilai *intercept* yang paling tinggi di antara daerah lainnya, yang menandakan bahwa IPM dasar di kedua daerah ini sudah relatif baik. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh faktor-faktor seperti infrastruktur yang lebih baik, akses yang lebih mudah ke layanan kesehatan dan pendidikan, serta kondisi sosial-ekonomi yang mendukung kemajuan pembangunan manusia. Meskipun nilai IPM di Palembang dan Lubuklinggau sudah tinggi, kebijakan yang lebih fokus pada peningkatan Dana Kesehatan dan Pendidikan tetap berpotensi memberikan dampak yang lebih besar, terutama dalam memperkuat sektor-sektor lain yang mendukung pembangunan manusia, seperti kesejahteraan sosial dan kesetaraan akses.

Sebaliknya, kabupaten/kota seperti Empatlawang (33.772904) dan Muratara (34.201130) memiliki nilai *intercept* yang lebih rendah, yang mengindikasikan bahwa IPM dasar di daerah-daerah ini relatif lebih rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas, serta kondisi sosial-ekonomi yang kurang mendukung. Untuk daerah-daerah dengan nilai *intercept* yang rendah, seperti Empatlawang dan Muratara, kebijakan yang lebih intensif dalam meningkatkan Dana Kesehatan dan Pendidikan akan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan IPM. Alokasi dana yang lebih besar untuk sektor-sektor tersebut dapat berfungsi sebagai penggerak utama dalam mengurangi ketimpangan pembangunan manusia, memperbaiki akses layanan kesehatan dan pendidikan, serta meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Sementara itu, daerah-daerah dengan nilai *intercept* yang berada di tengah, seperti

Banyuasin (35.499706), Muba (35.849174), dan OGAN ILIR (35.660530), menunjukkan kondisi IPM dasar yang relatif sedang. Hal ini mencerminkan adanya kemajuan dalam sektor-sektor terkait, namun tantangan di bidang pendidikan dan kesehatan masih perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Untuk kabupaten/kota seperti ini, penguatan kebijakan di bidang pendidikan dan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya yang terkait dengan kesejahteraan manusia.

Kesimpulan

Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kesehatan serta KB yang dibelanjakan provinsi Sumatera Selatan terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Meskipun DAK bidang pendidikan memiliki kecenderungan yang menurun dan DAK bidang kesehatan dan KB cenderung fluktuatif, namun mampu mempengaruhi peningkatan IPM di Sumatera Selatan. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa peningkatan IPM Sumsel dapat dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti investasi pemerintah dan swasta, pertumbuhan ekonomi dan lainnya.

Daftar Pustaka

Afkar, R., Luque, J., Nomura, S., & Marshall, J. (2020). Indonesia: Kajian Belanja Publik Daerah di Bidang Pendidikan Tahun 2020. www.worldbank.org

Fajar, M. A., & Indrawati, L. (2020). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Perumahan Dan Fasilitas Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 108-118. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/iarj/article/view/2366/1851>

Kurnia, T., Valeriani, D., & Darmawan, F. (2023). The Influence of Government Spending in Education, Health, and Economics on Indicators

for Calculation of Human Development Index in Bangka Belitung Islands Province. *International Journal of Current Science Research and Review*, 06(07), 5158-5180. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v6-i7-132>

Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 163-176. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.122>

Nugroho, D. F., Wicaksono, B. R., & Reynaldi, M. R. (2021). Special Allocation Fund and Poverty Rate in Indonesia. *Economics and Finance in Indonesia*, 67(2), 257-269. <https://doi.org/10.47291/efi.v67i2.811>

Palayukan, M. (2018). Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Studi Kasus Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 11(2), 12-34.

Purnomoratih, Y., & Ramadhani, S. N. (2023). Peran Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi terhadap Pembangunan SDM Kalimantan Selatan. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 4(2), 106-123. <https://doi.org/10.33105/jmp.v4i2.413>

Sumiyarti, S., & Lazuardy Pratama, C. (2024). Pengaruh Belanja Kesehatan, Belanja Pendidikan, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ipm Di Provinsi Jawa Barat. *Media Ekonomi*, 31(2), 181-194. <https://doi.org/10.25105/me.v31i2.18510>

Sutono, I. A., Perbendaharaan, D. J., & Keuangan, K. (2022). Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 3(2), 150-168. <https://doi.org/10.33105/jmp.v3i2.463>

Tambunan, C., & Amin, J. (2019). Dampak Belanja Negara Terhadap Tingkat Kegiatan Ekonomi Di Indonesia. *Media Ekonomi*, 27(1), 53-70. <https://doi.org/10.25105/me.v27i1.5303>



DIREKTORAT JENDERAL
STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Gd. R.M. Notohamiprodjo

Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat -
10710 Telp. +62 21 3441484

fiskal.kemenkeu.go.id

